

Ketidakadilan HIV:

Krisis yang Belum Usai

*Aisyah Humaida
Fuji Aotari*



Seri Monitor dan Dokumentasi 2019
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat



Aisyah Humaida, Fuji Aotari | Juni 2019

©2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pendokumentasi: Annisa Dinda

Penyunting: Ajeng Larasati

Desain Sampul: Astried Permata Septi

Foto Sampul: Ricky Gunawan

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet
Jakarta Selatan, 12820
Indonesia

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Metode Pemantauan dan Pencatatan	5
A. Metode Pemantauan dan Pencatatan Data	5
B. Batasan Penelitian	7
Analisis Data	9
A. Stigma	13
B. Diskriminasi	20
C. Stigma dan Diskriminasi	30
D. Pelanggaran Hak Lainnya	31
E. Bentuk Lain-Lain	37
F. Pihak yang Diberitakan	39
Penutup	43
A. Simpulan	43
B. Saran	44
Daftar Pustaka	45

PENDAHULUAN

Maraknya kesalahpahaman mengenai *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang berkembang di masyarakat melahirkan stigma terhadap HIV dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).¹ Stigma yang diberikan masyarakat ini berdampak buruk pada ODHA, mengingat pelabelan cap buruk umumnya disertai dengan tindakan diskriminatif. Salah satu stigma yang disematkan masyarakat terhadap HIV, yakni dianggap menjadi faktor penghambat pembangunan dan penyebab kesejahteraan menurun.²

Pelekatan stigma dan perlakuan diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap ODHA tersebut mengakibatkan ODHA tidak dapat menikmati hak asasi manusianya secara penuh. Pelanggaran hak atas privasi berupa pemeriksaan HIV tanpa persetujuan pasien menempati posisi teratas dalam pelanggaran hak-hak ODHA. Sulitnya mengakses layanan kesehatan juga menjadi bukti yang kuat ada cedera dalam pemenuhan hak-hak ODHA.

Salah satu contoh diskriminasi pada tahun 2018 terjadi di Provinsi Papua.³ Para calon atlet yang akan mengikuti kompetisi Pekan Olahraga Nasional 2020 wajib mengikuti serangkaian tes kesehatan yang salah satu indikatornya terbebas dari virus HIV. Hasilnya beberapa calon atlet batal mengikuti kompetisi karena dinyatakan terinfeksi virus HIV. Bentuk diskriminasi lain yang masih sering terjadi adalah penolakan masyarakat untuk memulasara jenazah ODHA.⁴ Kesalahpahaman terhadap cara penularan HIV ini membuat masyarakat enggan untuk membantu pemrosesan perawatan jenazah ODHA.

¹ Fuji Aotari, *Seri Monitoring dan Dokumentasi 2016: Diskriminasi HIV Stigma yang Mewabah*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2017), hal 9.

² Prokal.co, "2019 Kaltara Bebas Lokalisasi, Tarakan dan Nunukan jadi Target", <http://bulungan.prokal.co/read/news/12828-2019-kaltara-bebas-lokalisasi-tarakan-dan-nunukan-jadi-target.html>, diakses 14 Maret 2019.

³ Pasificpos.com, "Calon Atlet PON Papua Positif HIV", <https://www.pasificpos.com/item/25312-calon-atlet-pon-papua-pasitif-hiv>, diakses 14 Maret 2019.

⁴ SukaharjoneWS.com, "Jenazah Penderita HIV/AIDS Aman untuk Dimandikan", <https://sukaharjoneWS.com/ragam/jenazah-penderita-hiv-aids-aman-untuk-dimandikan/>, diakses 14 Maret 2019.

Dilihat dari fakta-fakta ini, pemanusiaan ODHA masih harus menempuh perjalanan panjang. Posisi ODHA sebagai bagian dari kelompok rentan membuatnya sulit untuk menuntut hak-haknya. Terlebih lagi dalam situasi ini pemerintah juga menjadi pelaku diskriminasi ODHA melalui produk hukum. Contohnya seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mewajibkan calon pengantin melakukan tes HIV melalui Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.⁵

Beban yang ditanggung ODHA sangatlah kompleks: persoalan kesehatan dirinya, pelabelan dan tindakan masyarakat terhadapnya, serta sikap pemerintah yang tidak berpihak padanya. Kondisi yang seperti itu semakin menyulitkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengobatan HIV. Orang-orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV menjadi enggan untuk memeriksakan diri karena khawatir atas perlakuan yang akan diterima pasca mengetahui status kesehatannya. Sementara mereka yang mengetahui statusnya enggan mengakses layanan pengobatan dan perawatan, khawatir akan pelabelan dan perlakuan diskriminasi yang lebih jauh lagi.

Kendati demikian, ada beberapa pihak yang mulai terbuka dan dapat menerima ODHA dengan baik. Contohnya adalah perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Ciamis.⁶ Pada 2015 lalu, RSUD Ciamis sempat menolak ODHA yang hendak melahirkan di rumah sakit tersebut. Namun sejak awal 2018, RSUD Ciamis mulai membuka tangannya dan berhasil membantu persalinan ODHA dengan sangat baik.

Mengingat stigma dan diskriminasi yang terus menerus terjadi ini, LBH Masyarakat menilai perlu untuk melakukan monitor media atas pemberitaan HIV. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlakuan yang diterima ODHA dan pihak yang melakukannya, sekaligus melihat tren pemberitaan terhadap isu HIV. Melalui data-data yang diperoleh dari media ini, LBH Masyarakat dapat

⁵ Fajar.co.id, "Sebelum Menikah Calon Pengantin Wajib Tes HIV", <https://fajar.co.id/2018/01/19/sebelum-menikah-calon-pengantin-wajib-tes-hiv/>, diakses 14 Maret 2019.

⁶ Rancahpost, "Sempat Dituding Diskriminatif terhadap Pasien ODHA, RSUD Ciamis Kini...", <https://www.rancahpost.com/201803104004/sempat-dituding-diskriminatif-terhadap-pasien-odha-rsud-ciamis-kini/>, diakses 14 Maret 2019.

melakukan pemetaan dan mengambil peran untuk melakukan pemanusiaan terhadap ODHA, serta dapat memberikan sumbangsih dalam proses penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN

A. Metode Pemantauan dan Pencatatan Data

Semua data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pemantauan media. Data-data yang didapat tersebut diolah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran jenis stigma dan diskriminasi yang banyak diterima oleh ODHA. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari stigma dan diskriminasi.

Data-data ini dikumpulkan oleh relawan yang sebelumnya telah diberi pemahaman seputar isu HIV. Untuk menyaring pemberitaan yang menjadi bahan penelitian, relawan menggunakan kata: HIV, AIDS, penderita HIV, stigma, diskriminasi, ARV, ODHA, dan ADHA sebagai kata kunci pencarian.

Berita-berita tersebut dikumpulkan secara periodik setiap dua minggu, mulai dari bulan Januari hingga Desember 2018. Media yang dipantau adalah semua media daring (*online*). Daftar media yang menjadi sumber data penelitian kami adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar Media Tempat Pencarian Berita

No.	Nama Media	Jumlah	No.	Nama Media	Jumlah
1	akurat.co	1	49	prokal.co	5
2	antaranews.com	2	50	radarbanyumas.co.id	2
3	antarantt.com	1	51	radarcianjur.com	1
4	asahansatu.com	1	52	radarcirebon.com	1
5	ayobandung.com	1	53	radartasikmalaya.com	3
6	balipost.com	1	54	radartegal.com	1
7	bangkapos.com	1	55	rakyatindependen.co.id	1
8	bantenhits.com	1	56	rancahpost.com	2
9	bbc.com	1	57	republika.co.id	9
10	beritabeta.com	1	58	riausky.com	1
11	beritajatim.com	2	59	satubmr.com	1
12	beritasampit.co.id	1	60	siarandepok.com	1
13	bisnisjakarta.co.id	1	61	sindonews.com	1
14	cnnindonesia.com	1	62	solopos.com	1

15	detik.com	2	63	solotrust.com	1
16	dnaberita.com	1	64	suara.com	1
17	duta.co	1	65	suaramerdeka.com	2
18	fajar.co.id	2	66	sukoharjoneWS.com	1
19	faktualnews.com	1	67	suryamalang.com	3
20	gentaandalas.com	1	68	tabloidjubi.com	1
21	goaceh.co	1	69	tagar.id	1
22	goriau.com	1	70	tangerangnews.com	1
23	harapanrakyat.com	3	71	tempo.co	1
24	harianjogja.com	1	72	timorexpress.co.id	1
25	Indopos	2	73	tobasatu.com	1
26	jatimnow.com	1	74	tribun-bali.com	1
27	jatimtimes.com	1	75	tribunbatam.id	1
28	jawapos.com	3	76	tribunbitung.com	1
29	joglosemarnews.com	1	77	tribunjabar.id	1
30	jpnn.com	2	78	tribunjakarta.com	1
31	jurnas.com	1	79	tribunjateng.com	4
32	kompas.com	4	80	tribunjatim.com	2
33	koropak.com	1	81	tribunjogja.com	1
34	malangtimes.com	1	82	tribunkalteng.com	1
35	malangtoday.net	1	83	tribunkaltim.co	2
36	merdeka.com	4	84	tribunlampung.co.id	2
37	metaonline.id	1	85	tribunmanado.co.id	1
38	netralnews.com	2	86	tribunnews.com	5
39	okezone.com	1	87	tribunpekanbaru.com	1
40	palopos.co.id	1	88	tribunpekanbaru.com	1
41	panturapost.com	1	89	tribunselayar.com	1
42	pasificpos.com	1	90	tribunstyle.com	1
43	petisi.co	1	91	tribuntoraja.com	1
44	pikiranrakyat.com	3	92	tribunwajo.com	1
45	pojokjabar.com	4	93	viva.co.id	1
46	pojoksatu.id	1	94	wartabromo.com	1
47	pos-kupang.com	3	95	wartaekonomi.co.id	1
48	potretnews.com	1			
Jumlah = 148					

B. Batasan Penelitian

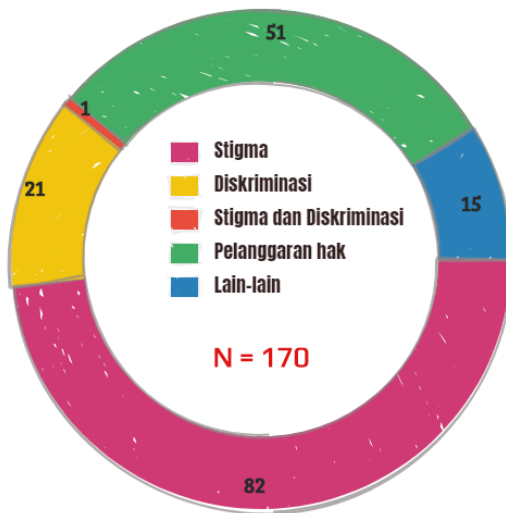
Pada pengumpulan data ini terdapat beberapa batasan, di antaranya relawan yang kesulitan memahami bentuk-bentuk berita bermuatan stigma dan diskriminasi. Serta ditemukannya bentuk-bentuk perlakuan lain yang tidak dapat dikategorikan dalam stigma dan diskriminasi, seperti ajakan penghapusan diskriminasi terhadap ODHA. Sebab itu dalam proses pengolahan data, LBHM benar-benar memastikan ulang pengklasifikasian dilakukan dengan tepat.

Keterbatasan lainnya adalah data didapatkan secara daring, sehingga tidak mencakup semua pemberitaan stigma dan diskriminasi atas isu HIV di setiap wilayah yang mungkin tidak dipublikasikan oleh media daring. Patut juga digarisbawahi bahwa pemberitaan di media daring juga tidak selalu memuat informasi detail yang dibutuhkan dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus stigma dan diskriminasi yang terjadi. Selain itu, data yang ada juga tidak sepenuhnya merepresentasikan fakta di lapangan karena tidak ada proses verifikasi.

ANALISIS DATA

Pemberitaan mengenai HIV yang berhasil dihimpun dalam pembuatan laporan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 148 berita yang berhasil dikumpulkan, kami melakukan pemilahan lebih lanjut untuk melihat bentuk-bentuk pelanggaran. Terdapat beberapa berita yang memiliki lebih dari satu elemen sehingga jumlah data yang diperoleh bertambah menjadi 170 kasus. Data tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi jenis-jenis di bawah ini:

Gambar 3.1. Pemberitaan mengenai HIV/AIDS Tahun 2018



Pemberian label buruk atau stigma masih menempati posisi teratas dalam isu HIV, yakni 82 berita. Sedangkan untuk tindakan diskriminasi diketahui ada sembilan bentuk dengan total pemberitaan sebanyak 21 kali. Di samping itu, kami juga menemukan satu artikel yang memberitakan perlakuan stigma dan diskriminasi yang dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat terhadap satu objek.

Selain tiga bentuk perlakuan tersebut, pemenuhan atas hak-hak ODHA menjadi hal yang sangat rentan dilanggar. Dari 51 jenis pelanggaran hak, 30 di antaranya disumbang oleh pengingkaran atas hak kesehatan berupa pemeriksaan HIV tanpa izin pasien. Akses layanan kesehatan HIV, pembocoran status HIV, dan

razia di tempat lokalisasi juga menjadi pelanggaran yang mendulang tingginya angka pengingkaran hak-hak ODHA.

Sedangkan untuk jenis yang kelima berisikan berita-berita dengan konten positif dan netral. Di antaranya, ajakan menghapus perlakuan diskriminasi terhadap ODHA, mendukung kesehatan ODHA, perbaikan akses layanan kesehatan ODHA, dan upaya pencegahan penularan HIV. Oleh sebab itu, berita-berita ini dikategorikan sebagai ‘bentuk lain-lain’.

Tak hanya memetakan jenis pemberitaan, kami juga memetakan wilayah asal berita-berita tersebut dihimpun. Seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Cakupan Wilayah Pemberitaan HIV/AIDS

No.	Kota/Kabupaten	Provinsi	Jumlah
1	Aceh Utara	Aceh	1
2	Banda Aceh		1
3	Denpasar	Bali	2
4	Jembrana		1
5	Klungkung		1
6	Singaraja		1
7	Bangka	Bangka Belitung	1
8	Tangerang	Banten	6
9	Tangerang Selatan		3
10	Yogyakarta	DIY	1
11	Sleman		1
12	Tidak disebutkan	DKI Jakarta	3
13	Jakarta		3
14	Jakarta Barat		2
15	Jakarta Selatan		1
16	Jakarta Timur		2
17	Tidak disebutkan	Jawa Barat	1
18	Bandung		3
19	Bandung Barat		1
20	Bekasi		3
21	Ciamis		3

22	Cianjur		4
23	Cimahi		1
24	Depok		4
25	Karawang		1
26	Majalengka		1
27	Pangandaran		5
28	Subang		1
29	Sukabumi		3
30	Tasikmalaya		1
31	Banyumas	Jawa Tengah	1
32	Brebes		1
33	Cilacap		3
34	Jepara		1
35	Kebumen		1
36	Klaten		2
37	Pekalongan		1
38	Purbalingga		3
39	Salatiga		1
40	Semarang		1
41	Sragen		2
42	Sukoharjo		1
43	Surakarta		1
44	Tegal		2
45	Blitar	Jawa Timur	1
46	Bojonegoro		2
47	Magetan		2
48	Malang		4
49	Mojokerto		1
50	Pasuruan		4
51	Pauruan		2
52	Probolinggo		1
53	Surabaya		2
54	Tulungagung		1
55	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	1
56	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	1
57	Palangka Raya		1

58	Pangkalan Bun		1
59	Bontang	Kalimantan Timur	1
60	Penajam Paser Utara		1
61	Bulungan	Kalimantan Utara	2
62	Nunukan		1
63	Tarakan		1
64	Batam	Kepulauan Riau	1
65	Bandar Lampung	Lampung	1
66	Lampung Utara		1
67	Ambon	Maluku	1
68	Sabu Raijua	NTT	1
69	Belu		2
70	Kupang		1
71	Jayapura	Papua	1
72	Nabire		1
73	Manokwari	Papua Barat	1
74	Indragiri Hilir	Riau	1
75	Pekanbaru		3
76	Makassar	Sulawesi Selatan	2
77	Kepulauan Selayar		1
78	Toraja Utara		1
79	Wajo		1
80	Toraja Utara		1
81	Palu	Sulawesi Tengah	2
82	Bitung		1
83	Kepulauan Sangihe		1
84	Tidak disebutkan	Sumatera Barat	2
85	Padang		1
86	Payakumbuh		1
87	Binjai	Sumatera Utara	1
88	Kota Kisaran Barat		1
89	Medan		1
90	Samosir		1
91	Gorontalo	Gorontalo	1

92	Tidak disebutkan	-	1
Jumlah			148

Berita yang berhasil dikumpulkan ini berasal dari 88 daerah yang letak perkara kejadiannya tertera jelas dalam pemberitaan. Enam pemberitaan hanya mencantumkan letak provinsi tanpa menyebutkan detail kota, yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Serta satu berita yang sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan lokasi kejadian berita tersebut diambil.

Dari 92 lokasi ini, Jawa Barat menjadi lokasi dengan pemberitaan terbanyak yakni 32 berita. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 21 berita dan Jawa Timur berjumlah 20 berita. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Papua Barat, dan Gorontalo hanya memiliki satu pemberitaan yang berkaitan dengan ODHA.

Kami tidak bisa menemukan faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya angka tersebut. Apakah disebabkan oleh jumlah penderita HIV atau pemahaman masyarakat tentang HIV. Namun dari sebaran lokasi tersebut terlihat bahwa isu HIV merata di seluruh Indonesia dengan berbagai bentuk perlakuan masyarakat terhadap penderita HIV.

Dari secuplik pemaparan lima bentuk perlakuan yang diterima HIV dan ODHA berdasar pemberitaan dan wilayah kejadian tersebut, kami akan menjabarkan lebih lanjut di bawah ini.

A. Stigma

Tabel 3.2. Bentuk-Bentuk Berita Stigma HIV

No.	Kutipan Pernyataan	Jumlah
1	HIV akibat seks bebas dan perilaku menyimpang	14
2	HIV diakibatkan penggunaan narkoba	3
3	HIV diasosiasikan dengan bencana	6
4	HIV adalah masalah moral, sosial, ekonomi	7

5	LGBT sebagai sumber penyebaran HIV	31
6	Kondom bukan sebagai alat pencegah HIV	1
7	Prostitusi sebagai sumber penyebaran HIV	15
8	Pemberantasan HIV dengan pendekatan agama	2
9	Salah paham mengenai penularan HIV	2
10	WNA sebagai sumber penyebaran HIV	1
Jumlah		82

Berdasarkan pemberitaan sepanjang tahun 2018, didapat 10 bentuk stigma yang dilabelkan terhadap HIV dan ODHA. Sepuluh bentuk stigma tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, HIV dianggap masalah agama dan moral. Kedua, HIV diasosiasikan dengan kelompok tertentu. Serta bagian ketiga yang menilai kondom bukanlah alat pencegahan HIV.

1. HIV adalah Masalah Moral dan Agama

Banyaknya persepsi salah yang berkembang di masyarakat mengaburkan problematika HIV sebenarnya. Masyarakat tidak memosisikan HIV sebagai masalah kesehatan, namun menjadikan HIV sebagai persoalan moral. Dengan kacamata tersebut HIV kerap kali dinilai sebagai akibat seks bebas dan perilaku menyimpang.⁷ Ketika memaknai penyimpangan perilaku ini, masyarakat

⁷ Radarcirebon.com, "Walah 13 Bayi di Majalengka Tertular HIV/AIDS", <http://www.radarcirebon.com/walah-13-bayi-di-majalengka-tertular-hiv-aids.html>, diakses 19 Maret 2019.

Lihat juga Okezone.com, "Orang Terjangkit HIV/AIDS Rata-Rata Diderita Kaum LGBT", <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/01/22/481/1848615/waduh-2-487-orang-terjangkit-hiv-aids-rata-rata-diderita-kaum-lgbt>, diakses 19 Maret 2019.

mengaitkannya dengan kelompok LGBT yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama dan bermasalah dalam kejiwaan.⁸

Selain dua hal tersebut, HIV dianggap sebagai bencana sosial sebab penderita HIV terstigma sebagai orang-orang yang nakal.⁹ Akibatnya yang tertanam dalam benak masyarakat HIV adalah penyakit yang meresahkan, menular, menakutkan, mematikan, dan penderitanya harus dijauhi. Kesalahpahaman ini diperparah dengan anggapan HIV mengakibatkan dampak buruk terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan penyebab kematian penduduk di usia produktif.¹⁰

Berdasarkan kesalahpahaman yang dilanggengkan masyarakat ini, pendekatan agama menjadi cara yang dihadirkan untuk mencegah penularan HIV, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.¹¹ Pada keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, metode ini dipilih karena persoalan HIV adalah masalah yang kompleks dan pendekatan agama merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran HIV.¹²

Sayangnya cara-cara yang dilakukan pemerintah tersebut tak menuai hasil konkret, sebuah hasil yang tidak mengherankan mengingat pendekatan ini didasari oleh kesalahpahaman. Pun kondisi yang terjadi malah sebaliknya, ODHA semakin terkucilkan dengan stigma-stigma yang diberikan masyarakat dan penanggulangan HIV tidak semakin mudah.

⁸ Rakyat Merdeka, "LGBT Faktor Penyebab Dampak dan Cara Mengatasinya", <https://rmol.co/amp/2018/02/06/325739/LGBT,-Faktor-Penyebab,-Dampak-Dan-Cara-Mengatasinya>, diakses 10 Mei 2019.

⁹ Wartabromo, "Tepis Stigma Negatif terhadap Penderita HIV/Aids", <https://www.wartabromo.com/2018/12/06/tepis-stigma-negatif-terhadap-penderita-hiv-aids/>, diakses 13 Mei 2019.

¹⁰ Republika, "Kasus HIV/Aids di Sukabumi Capai 659 Orang", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/20/p5w4bv384-kasus-hiv-aids-di-sukabumi-capai-659-orang>, diakses 13 Mei 2019.

¹¹ BBC.com, "Berdalih untuk Mencegah HIV/Aids Pemda Sumbar Ingin 'Memberantas' LGBT", <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42612086>, diakses 19 Mei 2019.

¹² Bantenhits.com, "Cegah Penularan HIV/Aids Pemkab Tangerang Libatkan Tokoh Agama", <https://bantenhits.com/2018/08/28/cegah-penularan-hiv-aids-pemkab-tangerang-libatkan-tokoh-agama/>, diakses 19 Maret 2019.

2. HIV Diasosiasikan pada Kelompok Tertentu

Salah satu perilaku yang berisiko menularkan HIV adalah hubungan seksual yang tidak aman. Sayangnya, perilaku ini kemudian disalah-asosiasikan dengan orientasi seksual dan identitas gender. Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual (LGBT) kemudian digadang sebagai sumber dan pelaku penyebaran HIV.¹³

Stigma yang diberikan masyarakat ini menutup mata bahwa potensi hubungan seksual tidak aman juga dimiliki oleh orang-orang dengan orientasi heteroseksual. Padahal, orientasi seksual tidak ada kaitannya dengan infeksi HIV. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, tidak ada perbedaan jumlah ODHA yang signifikan dari berbagai latar belakang orientasi seksual.¹⁴

Selain kelompok LGBT, orang-orang yang terlibat dalam kerja seks atau prostitusi juga sering disebut sebagai sumber penyebaran HIV. Akibatnya banyak prostitusi yang ditutup paksa oleh pemerintah.¹⁵ Padahal penutupan paksa ini tak pernah berbanding lurus dengan menurunnya penyebaran HIV. Hal ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, penutupan lokalisasi tidak menghentikan profesi pekerja seks.¹⁶ Dengan lokasi kerja seks yang yang tidak pada satu titik tertentu lagi

¹³ Jateng.tribunnews.com, "DKK Kota Salatiga Perlu Partisipasi Masyarakat untuk Mengurangi Penderita HIV/AIDS", <http://jateng.tribunnews.com/2018/12/04/dkk-kota-salatiga-perlu-partisipasi-masyarakat-untuk-mengurangi-penderita-hiv-aids/>, diakses 22 Maret 2019.

¹⁴ Kementerian Kesehatan, Laporan HIV/AIDS Kementerian Kesehatan, 2017. Tersedia di http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2017_rev.pdf http://www.siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_2_2017.pdf http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_3_2017.pdf http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_4_Tahun_2017_1_.pdf

¹⁵ Wartabromo.com, "PSK di Probolinggo Postif HIV/AIDS", <https://www.wartabromo.com/2018/11/28/3-psk-di-probolinggo-positif-hiv-aids/>, diakses 22 Maret 2019.

¹⁶ Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, "Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi," <https://arc-atmajaya.org/catatan-penelitian-dampak-penutupan-lokalisasi/>, diakses 14 Mei 2019.

membuat pendistribuan kondom dan pelicin tidak lancar.¹⁷ Pun informasi HIV/AIDS yang benar menjadi tidak mudah diperoleh, dan pemeriksaan tes HIV dengan teratur juga menjadi sulit dilakukan. Dampaknya laju penyebaran HIV tak terbendung.¹⁸

Tak hanya berdasarkan perilaku seksual, HIV pun kerap disalah-asosikan pada kelompok pengguna narkotika. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nusa Tenggara Barat, Dwi Murtiningrum menyatakan pengguna narkotika jenis apapun berpeluang atau rentan terjangkit penyakit HIV/AIDS.¹⁹ Pun menurutnya obat-obat terlarang tersebut memiliki peran penting dalam penularan HIV karena akan memberikan pengaruh untuk melakukan perilaku berisiko.

Kalimat-kalimat yang disampaikan itu seolah melabelkan bahaya pada seluruh jenis narkotika. Sementara dalam keperluan medis, narkotika jenis morfin digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang terbilang parah dan berkepanjangan, seperti nyeri pada kanker stadium lanjut.²⁰ Jika pernyataan yang disampaikan Dwi Murtiningrum bertujuan mengedukasi pencegahan penyebaran HIV sebaiknya tidak disampaikan secara general demikian. Namun dijelaskan dengan basis ilmiah mengenai cara penularan HIV dan jenis penggunaan narkotika yang memiliki resiko terinfeksi HIV.²¹

Pihak lain yang juga dikaitkan dengan HIV adalah warga negara asing. Pada November 2018 lalu pihak Imigrasi Kelas II Singaraja Bali menemukan Warga

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ VOA Indonesia, "Kesadaran Pekerja Seks tentang Risiko HIV/AIDS", <https://www.voaindonesia.com/a/kesadaran-pekerja-seks-tentang-risiko-hiv-aids/4148131.html>, diakses 14 Mei 2019.

¹⁹ Lombokpost, "Pengguna Narkoba Rentan Terkena HIV/AIDS", <http://lombokpost.net/2018/12/13/pengguna-narkoba-rentan-terkena-hiv-aids/>, diakses 15 Mei 2019.

²⁰ Alodokter, "Morfin", <https://www.alodokter.com/morfin>, diakses pada 15 Mei 2019.

²¹ Rumah Cemara, "HIV dan Alat Suntik Narkoba", <https://rumahcemara.or.id/hiv-dan-alat-suntik-narkoba/>, diakses 16 Mei 2019.

Negara Asing (WNA) asal Uganda yang mengidap HIV.²² Dari penemuan ini pihak Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali mengatakan jangan ada WNA lagi yang datang ke Indonesia dan menyebarkan HIV. Seharusnya perilaku berisikolah yang menjadi titik poin dalam penyebaran HIV dan dengan pemahaman benar ini pelabelan HIV tidak dibebankan pada kelompok tertentu.

3. Kondom Bukan sebagai Alat Pencegah HIV

Narasi kondom selalu dipenuhi dengan konotasi negatif. Masyarakat lebih mengenal kondom sebagai alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan. Pemahaman yang diketahui masyarakat ini memosisikan kondom sebagai pengaman untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Oleh karena itu, kampanye penggunaan kondom kerap dibenturkan dengan pandangan moral dan agama.

Dengan kondisi yang demikian, memberikan pemahaman penggunaan kondom sebagai alat kesehatan pada masyarakat sangat sulit. Masyarakat seakan tak mau tahu jika kondom adalah alat kesehatan yang memiliki banyak manfaat, termasuk untuk mencegah infeksi penularan penyakit melalui hubungan seksual. Lagi-lagi pemahaman salah yang masih dipelihara ini mempersulit upaya pencegahan HIV.

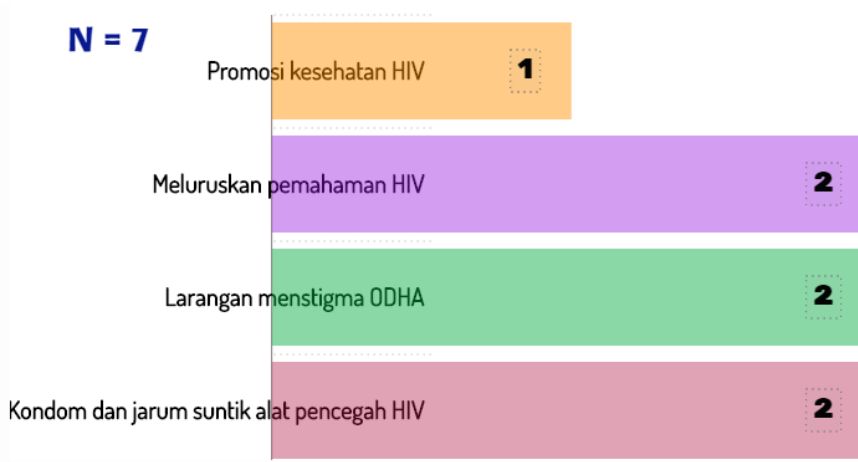
Padaahal efektivitas kondom dalam melindungi dari virus HIV sudah terbukti. Mengutip keterangan National Institute for Health bahwa penggunaan kondom secara efektif dan efisien mampu mengurangi risiko transmisi infeksi seksual sebanyak 80-90% untuk kondom laki-laki dan 94-97% untuk kondom perempuan.²³ Dengan fakta ini semestinya masyarakat menghentikan stigmatisasi pada kondom.

²² Kaltim.tribunnews.com, Pertama Kalinya Imigrasi Singaraja Deportasi WNA Pengidap HIV/AIDS", <http://kaltim.tribunnews.com/2018/11/06/ini-pertama-kalinya-imigrasi-singaraja-deportasi-wna-pengidap-hiv-aids?page=all>, diakses 22 Maret 2019.

²³National Institute for Health, "Nanotechnology and the Future of Condoms in the Prevention of Sexually Transmitted Infections", <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5875119/>, diakses 27 Maret 2019.

Antitesis Stigma

Gambar 3.2. Kutipan Antitesis Stigma HIV



Sebagaimana telah disampaikan di atas, kesalahpahaman tentang HIV melanggengkan stigma terhadap ODHA. Secara perlahan beberapa masyarakat dan aparatur sipil negara yang paham mulai mengajak untuk melawan stigma-stigma yang dilabelkan pada ODHA dan HIV. Sebagai contoh, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aries Merdeka Sirait, yang mengajak masyarakat untuk memahami persoalan HIV dengan baik, sehingga ketika berdekatan dengan ODHA tidak perlu merasa takut ataupun khawatir.²⁴

Ajakan ini juga dilakukan oleh Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, dr. Umar Zein, yang mengimbau masyarakat untuk menghilangkan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penderita HIV. Zein juga meminta ODHA untuk terus semangat dalam menjalani pengobatan.²⁵ Senada dengannya, Hardisman, salah satu dosen di Universitas Andalas menjelaskan kendati populasi penderita HIV banyak yang berasal dari LSL tak berarti berhak

²⁴ Dnaberita.com, "28 Persen dari 89 Juta Anak Indonesia Tarinfeksi HIV", <http://dnaberita.com/2018/01/15/28-persen-dari-89-juta-anak-indonesia-tarinfeksi-hiv-aids/>, diakses 29 April 2019.

²⁵ *Ibid.*

untuk mendiskriminasi hak-hak mereka, sebab mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi sosial.²⁶

Seruan-seruan untuk menghapus stigma dan menghilangkan diskriminasi tersebut mendorong langkah-langkah pencegahan HIV. Hal ini tercermin dari efek yang ditimbulkan dari sosialisasi-sosialisasi yang kerap digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, yakni adanya perasaan aman dari stigma dan diskriminasi membuat masyarakat yang memiliki perilaku berisiko dengan sukarela mengikuti pemeriksaan HIV.²⁷

Terciptanya lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi tersebut, juga berdampak pada kesadaran penggunaan kondom. Seperti masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Klungkung, Bali, secara reguler mengontak KPA setempat jika persediaan kondom mereka habis.²⁸ Perilaku ini terbangun karena didasari pemahaman HIV yang baik dan kesadaran untuk mencegah risiko penularan HIV.

B. Diskriminasi

Table 3.3. Bentuk-Bentuk Tindakan Diskriminasi HIV

No.	Bentuk Tindakan	Jumlah
1	ADHA dikeluarkan dari sekolah	1
2	Penolakan pemulasaraan ODHA	1
3	Penggantian calon atlet yang terkena HIV	1
4	Pengasingan terhadap ODHA	3

²⁶ Gentaandalas.com, "PIKMAG Gelar Kuliah Umum Ketahanan Mahasiswa Terhadap LGBT", <https://www.gentaandalas.com/pigmag-gelar-kuliah-umum-ketahanan-mahasiswa-terhadap-lgbt/>, diakses 29 April 2019.

²⁷ Goaceh.co, "Selama 11 Tahun 35 Pengidap HIV/Aids di Aceh Utara Meninggal Dunia", <https://www.goaceh.co/berita/baca/2018/04/07/selama-11-tahun-35-pengidap-hiv-aids-di-aceh-utara-meninggal-dunia>, diakses 29 April 2019.

²⁸ Bali.tribunnews.com, "Lokalisasi di Klungkung Terpusat di Wilayah Ini PSK di Bedeng hingga Penginapan Short Time", <http://bali.tribunnews.com/2018/04/19/5-lokalisasi-di-klungkung-terpusat-di-wilayah-ini-psk-di-bedeng-hingga-penginapan-short-time?page=2>, diakses 29 April 2019.

5	Peraturan tentang larangan prostitusi	1
6	Peraturan tentang kewajiban tes HIV	9
7	Peraturan yang mensyaratkan bebas HIV/AIDS	2
8	Razia lokalisasi	2
9	Wacana kriminalisasi terhadap kampanye penggunaan kondom	1
Jumlah		21

Mengutip dari laman World Health Organization Eropa yang menjelaskan bahwa stigma merupakan penyebab utama diskriminasi,²⁹ adalah benar adanya. Pada laporan yang dikeluarkan oleh badan PBB yang menangani Aids, UNAIDS dijelaskan juga bahwa stigma dapat menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia lain yang memengaruhi kesejahteraan hidup ODHA.³⁰ Stigma yang diberikan masyarakat tersebut berakibat perlakuan diskriminasi terhadap ODHA. Tercermin dari hasil monitor media tahun ini, tercatat sembilan bentuk perlakuan diskriminasi sebanyak 21 kasus.

1. Penolakan ODHA dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pada awal Mei 2018, Komite Olahraga Nasional (KONI) Papua telah memproyeksikan 487 calon atlet untuk berkompetisi dalam Pekan Olahraga Nasional 2020.³¹ Sebelum resmi mengikuti perlombaan tersebut, seluruh calon atlet harus mengikuti serangkaian tes kesehatan yang salah satu syaratnya harus terbebas dari virus HIV. Di titik inilah beberapa calon atlet tidak lolos karena dinyatakan terinfeksi virus HIV.

²⁹ World Health Organization Regional Office for Europe, "Stigma and discrimination", <http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-areas/stigma-and-discrimination>, diakses 1 April 2019.

³⁰ UNAIDS, "HIV-Related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations", http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol_en.pdf diakses pada 20 Mei 2019.

³¹ Pasificpos.com, "Calon Atlet PON Papua Positif HIV", <https://www.pasificpos.com/item/25312-calon-atlet-pon-papua-pasitif-hiv>, diakses 14 Maret 2019.

KONI Papua seyogianya berkaca pada prestasi Tri Eklas Tesa Sampurno, ODHA yang berhasil mewakili tim nasional *street soccer* di ajang Homeless World Cup 2011, Paris, Prancis.³² Begitupun dengan prestasi yang dicapai Eva Dewi Rahmadiani, penyintas HIV yang berprestasi dalam olahraga sepak bola wanita.³³ Eva menjadi satu-satunya perwakilan perempuan yang mengikuti pertandingan *street soccer international* Homeless World Cup 2018, di Meksiko. Hal ini seharusnya dapat memberikan pembuktian bahwa status HIV tidak menjadi penghalang untuk berprestasi.

Tragisnya diskriminasi juga terjadi pada seorang anak berusia 10 tahun asal Tulungagung, Jawa Timur.³⁴ Setelah statusnya diketahui, Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) ini dikucilkan dari sekolah. Teman-temannya enggan bermain dengannya. Tak tanggung-tanggung para wali murid sekolah tersebut mengancam pihak sekolah akan memutasikan anak-anak mereka jika pihak sekolah tidak mengeluarkan ADHA tersebut dari sekolah.

Serupa juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Pada awal Mei 2018 seorang pria berusia 33 tahun ditolak kembali ke kampung halamannya karena mengidap HIV.³⁵ Perilaku masyarakat ini didasari ketakutan akan tertular HIV. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang memicu timbulnya perilaku diskriminasi. Termasuk sikap masyarakat yang kerap menolak untuk memulasara jenazah ODHA.³⁶

³² Health.detik.com, "Berhasil Finis Marathin 42 Km, Tesa Patahkan Stigma HIV-Aids", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4329534/berhasil-finis-marathon-42-km-tesa-patahkan-stigma-hiv-aids>, diakses pada 20 Mei 2019.

³³ Medcom.id, "Status ODHA Tak Halangi Eva Berprestasi di Olahraga", <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/RkjZEW3k-status-odha-tak-halangi-eva-berprestasi-di-olahraga>, diakses pada 20 Mei 2019.

³⁴ Tribunnews.com, "Kisah Bocah SD yang Dikucilkan di Sekolahnya karena Ketahuan HIV", <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/23/kisah-bocah-sd-yang-dikucilkan-di-sekolahnya-karena-ketahuan-tertular-hiv?page=all>, diakses 1 April 2019.

³⁵ Suaramerdeka.com, "KPA Klaten Temukan Seorang Pengidap HIV Asal Luar Kota", <https://www.suaramerdeka.com/kesehatan/baca/83841/kpa-klaten-temukan-seorang-pengidap-hiv-asal-luar-kota>, diakses 8 April 2019.

³⁶ Sukoharjone.ws, "Jenazah Penderita HIV/Aids Aman untuk Dimandikan", <https://sukoharjone.ws/jenazah-penderita-hiv-aids-aman-untuk-dimandikan/>, diakses pada 16 Mei 2019.

Dari berita-berita tersebut, terlihat bahwa pemicu tindakan diskriminasi karena ketidaktahuan masyarakat akan penularan HIV. Meski HIV termasuk penyakit menular, namun penularannya tidak semudah virus flu. Cara penularan HIV dikenal dengan istilah ESSE.³⁷ Empat prinsip tersebut yakni:

- *Exit*: Virus harus keluar dari tubuh yang terinfeksi, baik melalui hubungan seksual, ASI, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi.
- *Survive*: Untuk dapat menularkan HIV, virus harus bisa bertahan hidup di luar tubuh orang yang terinfeksi sebelum akhirnya masuk ke tubuh orang lain. Ketika berada di luar tubuh manusia, virus HIV ini mudah mati. Udara dan temperatur sangat mempengaruhi ketahanan virus HIV.
- *Sufficient*: Jumlah virusnya harus cukup untuk dapat menginfeksi. Jika virusnya sedikit tidak akan berpengaruh. Itu sebabnya jangan percaya dengan orang yang menakut-nakuti ada tusuk gigi atau jarum di tempat umum yang berasal dari ODHA, selain jumlah virusnya sedikit, virusnya juga mati.³⁸
- *Enter*: Untuk dapat menginfeksi, jumlah virus yang cukup tersebut harus masuk ke tubuh orang lain. Hal ini terjadi melalui: pertukaran darah dari luka terbuka saat berhubungan seks, jarum yang tidak steril dan terkontaminasi HIV; pertukaran cairan (semen) selama hubungan seksual; konsumsi ASI melalui ibu yang terinfeksi HIV.³⁹

2. Diskriminasi terhadap Kelompok Pekerja Seks

Stigma masyarakat yang menilai HIV adalah akibat dari seks bebas berdampak buruk pada pekerja seks. Prostitusi dianggap sebagai sumber utama penyebaran HIV. Dampaknya beberapa lokalisasi dirazia, seperti yang terjadi di

³⁷ Jurnas.com, "Empat Prinsip Penularan HIV yang Harus Dipahami", <http://www.jurnas.com/artikel/34528/Empat-Prinsip-Penularan-HIV-yang-Harus-Dipahami/>, diakses 8 April 2019.

³⁸ Penjelasan dr. Ekarini Aryasatiani, Sp. OG melalui <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/12/01/11380924/4.prinsip.penularan.hiv>, diakses 19 Mei 2019.

³⁹ Teachers' Guide for the Reference Material on HIV, AIDS & STI for High School Students, http://www.fast-trackcities.org/sites/default/files/Teachers%20Guide_Final_7182017.pdf, (Philippines, May 2017), hal. 12.

Tretes, Jawa Timur.⁴⁰ Hal serupa juga dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menyisir tempat-tempat penginapan, mencari pasangan bukan suami istri yang sekamar.⁴¹

Dari merazia tempat-tempat tersebut, beberapa pekerja seks ditemukan menderita HIV. Berdasarkan fakta inilah tindakan razia tersebut berlanjut pada penutupan lokalisasi, sebagaimana yang terjadi di Tondo Kiri, Palu, Sulawesi Tengah.⁴² Namun alih-alih mencegah dan mengurangi penderita HIV, penutupan lokalisasi ini dapat berdampak buruk bagi upaya pencegahan HIV. Sosialisasi pencegahan dan pengobatan HIV akan semakin sulit karena pekerja seks tidak lagi pada satu lokasi yang dapat diakses.

3. Kebijakan yang Mewajibkan Tes HIV

Membicarakan HIV tentu erat kaitannya dengan hak atas kesehatan. Pada kerangka hak atas kesehatan memuat dua unsur yang menjadi dasar pemenuhan setiap individu, yakni kebebasan (*freedom*) dan keberhakan (*entitlement*). Kebebasan berarti setiap orang berhak mengatur dan mengontrol tubuhnya tanpa ada intervensi yang tidak ia kehendaki. Sedangkan keberhakan berarti setiap individu berhak untuk menikmati sistem pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk layanan kesehatan.

Tingginya momok akan HIV membuat pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan tes HIV. Hal ini terjadi di beberapa kota, di antaranya Binjai⁴³,

⁴⁰ Manado.tribunnews.com, "Pakai Modus Baru Belasan PSK Diamankan", <http://manado.tribunnews.com/2018/02/01/pakai-modus-baru-belasan-pskdiamankan-satpol-pp>, diakses 8 April 2019.

⁴¹ Jabar.pojoksatu.id, "Pasangan Sekamar Bukan Muhrim Terjaring Razia Satpol PP Kota Sukabumi", <http://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2018/05/15/pasangan-sekamar-bukan-muhrim-terjaring-razia-satpol-pp-kota-sukabumi/>, diakses 8 April 2019.

⁴² Republika.co.id, "MUI Serukan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Tondo Kiri", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/12/p416tg377>, diakses 8 April 2019.

⁴³ Jurnas.com, "Calon Pengantin Binjai Ikuti Tes Narkoba Ini Hasilnya", <http://www.jurnas.com/artikel/29118/539-Calon-Pengantin-Binjai-Ikuti-Tes-Narkoba-Ini-Hasilnya/>, diakses 19 Mei 2019.

Tangerang Selatan⁴⁴, Lampung Utara⁴⁵, Bojonegoro⁴⁶, dan Cianjur⁴⁷. Secara khusus juga ada pemaksaan pemeriksaan tes HIV kepada ibu hamil, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Purbalingga, Jawa Barat⁴⁸ dan Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara.⁴⁹ Langkah ini tentunya merupakan pelanggaran hak atas kesehatan, pemerintah menempatkan intervensi yang bersifat wajib terhadap individu.

Pelanggaran hak atas kesehatan yang dilakukan pemerintah tersebut juga mendorong pihak ketiga melakukan hal serupa. Seperti yang terjadi di Kota Malang, para pemberi lapangan kerja mensyaratkan bebas HIV kepada para pekerja yang hendak melamar.⁵⁰ Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kota Malang ingin mendapatkan label kota industri terbaik 2018 dengan menerapkan lingkungan kerja bebas HIV sebagai tolak ukurnya.

Sikap diskriminatif terhadap ODHA tersebut tidak hanya terjadi pada level daerah, tetapi juga pada tingkat nasional. Seperti yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam membuka seleksi sekolah kedinasan Politeknik Ilmu

⁴⁴ Bisnisjakarta.co, "Calon Pengantin di Tangsel Wajib Tes HIV/Aids", <https://bisnisjakarta.co.id/2018/01/22/calon-pengantin-di-tangsel-wajib-tes-hiv-aids/>, diakses 19 Mei 2019.

⁴⁵ Lampung.tribunnews.com, "Hingga Januari 2018 Tercatat 2 Warga Lampura Positif HIV", <http://lampung.tribunnews.com/2018/02/20/hingga-januari-2018-tercatat-2-warga-lampura-positif-hiv>, diakses 11 April 2019.

⁴⁶ Fajar.co.id, "Sebelum Menikah Calon Pengantin Wajib Tes HIV", <https://fajar.co.id/2018/01/19/sebelum-menikah-calon-pengantin-wajib-tes-hiv/>, diakses 19 Mei 2019.

⁴⁷ Netralnews.com, "Penderita HIV/Aids Baru di Cianjur", <http://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/125915/168.penderita.hiv.aids.baru.d.i.cianjur>, diakses 11 April 2019.

⁴⁸ Jateng.tribunnews.com, "Sebanyak 6 Bayi di Purbalingga Berpotensi Tertular HIV/Aids", <http://jateng.tribunnews.com/2018/01/27/sebanyak-6-bayi-di-purbalingga-berpotensi-tertular-hiv-aids>, diakses 19 Mei 2019.

⁴⁹ Manado.tribunnews.com, "Duh Jumlah ODHA di Bitung Masih Tinggi dan Terus Meningkat", <http://manado.tribunnews.com/2018/02/22/duh-jumlah-odha-di-bitung-masih-tinggi-dan-terus-meningkat>, diakses 11 April 2019.

⁵⁰ Malangtimes.com, "Tahun Ini Kabupaten Malang Ditarget Jadi Wilayah Industri Terbaik di Jawa Timur", <http://www.malangtimes.com/baca/24229/20180120/123737/tahun-ini-kabupaten-malang-ditarget-jadi-wilayah-industri-terbaik-di-jawa-timur/>, diakses 11 April 2019.

Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi pada pertengahan 2018 lalu yang mewajibkan surat keterangan bebas HIV/AIDS sebagai salah satu syarat seleksi.⁵¹ Ketentuan ini tentu menutup akses ODHA untuk mengenyam pendidikan di dua lembaga tersebut.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melarang kewajiban tes HIV dalam rekrutmen.⁵² Sayangnya peraturan yang mendukung ini justru menjadi tumpul dalam penegakkannya. Syarat lingkungan kerja dan pendidikan yang bebas HIV tidak berarti menyudahi penyebaran HIV. Negara memang berkewajiban melarang perbuatan diskriminasi dengan alasan status kesehatan.⁵³ Lebih jauh lagi, Negara juga seharusnya memastikan bahwa peraturan, kebijakan, dan program yang dibuat untuk melarang praktek diskriminasi dapat ditegakkan.

4. Wacana Kriminalisasi Penggunaan Kondom

Tidak ada peraturan nasional yang mengriminalisasi kondom. Sayangnya pada pertengahan tahun 2018 publik ramai menanggapi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mewacanakan untuk mempidanakan kondom.⁵⁴ Usulan hukum ini menunjukkan ketidakpahaman pemerintah mengenai fungsi kondom. Pemerintah seakan tidak melihat bahwa kondom adalah alat kesehatan yang dapat mencegah penyebaran HIV. Pada rancangan peraturan tersebut juga disebutkan bahwa mempromosikan dan mempertunjukkan

⁵¹ Detik.com, "Sekolah Dinas Kementerian Hukum dan HAM Buka Pendaftaran", <https://finance.detik.com/lowongan-kerja/d-3960318/sekolah-dinas-kementerian-hukum-dan-ham-buka-pendaftaran>, diakses 11 April 2019.

⁵² Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids di Tempat Kerja, Pasal 5.

⁵³ Office The United Nations High Commissioner for Human Rights, *The Right to Health* (Fact Sheet no. 31), Tersedia di https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/Factsheet31.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1, hal. 20-21.

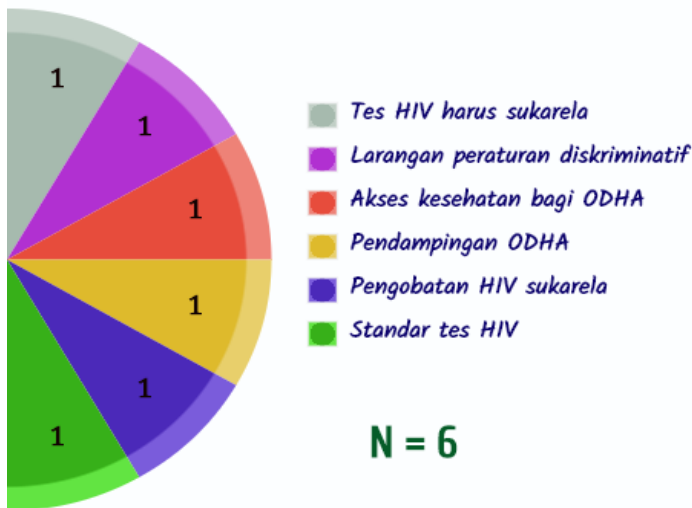
⁵⁴ Republika.co.id, "Manege: Orang yang Kampanyekan Kondom Perlu Dipidana", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/17/p49gbi384-maneger-orang-yang-kampanyekan-kondom-perlu-dipidana>, diakses 16 April 2019.

kondom hanya bisa dilakukan oleh petugas yang berwenang. Padahal program penanggulangan HIV selama ini selalu dibantu oleh masyarakat sipil.⁵⁵

Sikap yang ditunjukkan pemerintah ini merupakan sebuah tindakan kontradiksi dengan keinginannya untuk mencegah dan menanggulangi HIV. Kondom kerap kali dipandang negatif karena hanya dilihat dari satu fungsi yakni sebagai alat kontrasepsi. Narasi ini kerap dikaitkan dengan melegalkan perilaku zina yang bertentangan dengan moral dan agama. Kebijakan yang berbasis moralitas seperti ini menjadi masalah. Jika pemerintah benar-benar berniat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV, kebijakan yang dibuatnya harus secara holistik berbasis pada bukti atau ilmiah. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah memandang kondom sebagai alat kesehatan yang secara efektif dapat mencegah penyebaran HIV.

Antitesis Diskriminasi

Gambar 3.3. Bentuk Antitesis Diskriminasi HIV



⁵⁵ Kebijakan AIDS Indonesia, "Peran Masyarakat Nonkesehatan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS", <http://www.kebijakanaidsideonesia.net/id/artikel/artikel-tematik/1316-peran-masyarakat-non-kesehatan-dalam-penanggulangan-hiv-dan-aids>, diakses 16 April 2019.

Kendati tindakan diskriminasi masih kerap dialami ODHA, kami juga mendapatkan data mengenai ajakan untuk menghapus diskriminasi yang diangkat dalam pemberitaan media. Misalnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yang memberikan pelatihan tata laksana pemulasaraan jenazah ODHA guna mengurangi diskriminasi terhadap ODHA.⁵⁶ Dengan pembekalan ini para modin menjadi tahu cara memulasara jenazah ODHA sehingga tidak perlu khawatir terinfeksi HIV dan tercipta rasa aman saat merawat jenazah ODHA.

Selain itu, pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) juga giat melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV. KPA juga aktif meminta organisasi perangkat daerah untuk turut serta melakukan sosialisasi, sehingga individu-individu yang memiliki perilaku berisiko menjadi tahu akan dampak HIV sehingga dengan sukarela melakukan pemeriksaan HIV. Kegiatan-kegiatan ini telah aktif dilakukan di beberapa daerah, di antaranya oleh KPA Daerah Purbalingga, Jawa Tengah⁵⁷; Dinas Kesehatan Kota Bitung, Sulawesi Utara⁵⁸; dan Dinas Kesehatan Kalimantan Utara⁵⁹.

Bentuk pendekatan yang dilakukan pemerintah tersebut, tak terhenti pada sosialisasi saja. Jika di antara peserta sosialisasi yang hadir berkeinginan melakukan pemeriksaan dan ditemukan positif terinfeksi HIV, maka selanjutnya akan dilakukan konseling. Sebab pada banyak kasus setelah mengetahui dirinya positif terinfeksi HIV reaksi pertamanya akan syok. Dari hal inilah konseling itu dinilai penting dilakukan. Pun pengonsumsi obat juga tidak dipaksakan, ODHA dibebaskan untuk melakukan atau tidak. Jika pilihannya untuk

⁵⁶ Jateng.tribunnews.com, "Modin Dapat Pelatihan Rawat Jenazah ODHA", <http://jateng.tribunnews.com/2018/03/27/50-modin-dapat-pelatihan-rawat-jenazah-odha>, diakses 17 April 2019.

⁵⁷ Merdeka.com, "Kasus HIV/Aids Meningkat Warga Purbalingga Diminta Sukarela Periksa ke Dokter", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-hiv-aids-meningkat-warga-purbalingga-diminta-sukarela-periksa-ke-dokter.html>, diakses 17 April 2019.

⁵⁸ Manado.tribunnews.com, "Duh Jumlah ODHA di Bitung Masih Tinggi dan Terus Meningkat", <http://manado.tribunnews.com/2018/02/22/duh-jumlah-odha-di-bitung-masih-tinggi-dan-terus-meningkat>, diakses 17 April 2019.

⁵⁹ Kaltara.prokal.co, "Waduh Celaka Penderita HIV/Aids Meningkat", <http://kaltara.prokal.co/read/news/21554-waduh-celaka-penderita-hiv-aids-meningkat.html>, diakses 17 April 2019.

mengonsumsi obat, ODHA juga dapat memilih apakah obatnya akan diambil di rumah sakit atau puskesmas. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas ODHA tersebut.

Tindakan ini semestinya menjadi contoh untuk diikuti pemerintah daerah lain. Upaya pencegahan HIV sebaiknya memang tidak berhenti pada sosialisasi saja. Pemahaman-pemahaman benar tentang HIV yang disampaikan pada sosialisasi dapat meluruskan label-label salah dan ketakutan-ketakutan yang selama ini menjadi momok masyarakat. Dari sosialisasi inilah kesadaran masyarakat akan kesehatan terbangun. Sebabnya pemerintah perlu memberikan fasilitas pada masyarakat untuk melakukan tes kesehatan dan menjamin status kesehatan mereka terjaga.

Upaya lain yang cukup penting untuk mengurangi perlakuan diskriminasi terhadap ODHA adalah dengan membuat peraturan yang tidak mendiskriminasi ODHA. Cara ini dilakukan oleh Komisi E DPRD Jawa Timur dalam merespon tingginya penyebaran virus HIV di Jawa Timur.⁶⁰ Pada rancangan peraturan tersebut pasangan yang akan menikah boleh meminta pasangannya untuk melakukan tes HIV. Apabila dinyatakan terinfeksi HIV pasangan tersebut dibebaskan untuk memilih akan meneruskan pernikahannya atau tidak. Menunda pernikahan demi pengobatan juga boleh dilakukan pasangan tersebut untuk menghindari penyebaran HIV.

Serupa juga dilakukan oleh DPRD Palu pada Februari 2018.⁶¹ Tingginya angka penyebaran HIV di Palu, membuat DPRD Palu merasa perlu untuk melakukan langkah penanggulangan yang tidak biasa. Salah satu gagasannya adalah merencanakan adanya bank kondom dalam Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/AIDS. Kendati akan menimbulkan pro kontra dari masyarakat, namun ini adalah salah satu cara terampuh untuk menekan penyebaran HIV.

⁶⁰ Tagar.id, "Miris 80 Bayi Lahir di RSUD dr Soetomo Terinfeksi HIV" <https://www.tagar.id/miris-80-bayi-lahir-di-rsud-dr-soetomoterinfeksi-hivaid>, diakses 18 April 2019.

⁶¹ JPNN.com, "Politikus Demokrat Usul ATM Kondom", <https://www.jpnn.com/news/politikus-demokrat-usul-atm-kondom>, diakses 18 April 2019.

C. Stigma dan Diskriminasi

Pada pemaparan awal dijelaskan bahwa stigma dan diskriminasi dapat terjadi pada satu waktu yang bersamaan. Seperti yang terjadi pada pertengahan Oktober 2018, tiga ADHA terancam diusir oleh masyarakat dari tempat tinggal mereka di Pulau Samosir.⁶² Kejadian ini bermula ketika tiga anak yang terdiri dari satu anak Pendidikan Anak Usia Dini dan dua anak Sekolah Dasar itu terbongkar status HIV-nya.

Terbongkarnya informasi ini membuat para wali murid meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan tiga anak tersebut. Mereka juga mengusulkan untuk menyediakan kelas khusus ADHA atau meminta ADHA menjalani *homeschooling* saja. Permintaan para wali murid ini didasari perasaan khawatir anak-anak mereka akan terpapar HIV dari luka-luka ADHA yang mungkin terjadi saat bermain bersama. Lebih jauh lagi, mereka juga diultimatum oleh masyarakat untuk meninggalkan Pulau Samosir.

Dari keterangan ini terlihat jelas bahwa ada ketidakpahaman mengenai penularan HIV. Padahal untuk terjadi penularan HIV harus memenuhi empat kondisi atau ESSE, sebagaimana telah kami jelaskan di atas. HIV tidak menular melalui kontak biasa seperti air mata atau keringat.⁶³ Juga tidak menular dengan cara berpelukan, berbagi mainan, atau berbagi peralatan makanan dan minuman.⁶⁴ Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa ADHA tidak dapat berinteraksi normal dengan anak lainnya.

Sekolah seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat dalam mempromosikan pemahaman HIV yang benar dan memperlakukan ADHA dengan baik.⁶⁵ Sekolah memiliki peran untuk melakukan dua hal tersebut

⁶² Cnnindonesia.com, "Tiga Anak Pengidap HIV Tercancam Diusir dari Samosir", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181022072221-20-340275/tiga-anak-pengidap-hiv-terancam-diusir-dari-samosir>, diakses 23 April 2019.

⁶³ Thewellproject.org, "Care and Treatment Children Living HIV", <https://www.thewellproject.org/hiv-information/care-and-treatment-children-living-hiv>, diakses 19 Mei 2019.

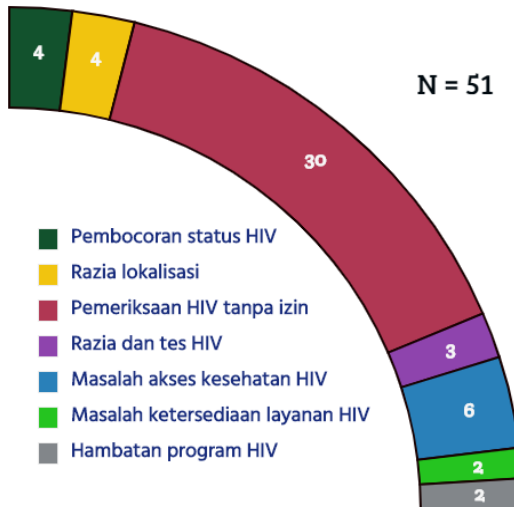
⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ UNICEF, Innocenti Research Centre, "Caring for Children Affected by HiV and Aids", <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight-hiv-eng.pdf>, page 15.

sehingga ADHA tidak terasing dan mendapatkan perhatian khusus. Begitupun dengan pemerintah sebagai elemen paling utama yang harus memastikan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan ADHA terpenuhi.

D. Pelanggaran Hak Lainnya

Gambar 3.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak



Berdasarkan data yang terkumpul, didapat juga beberapa berita yang tidak bermuatan stigma dan diskriminasi. Pemberitaan tersebut mengandung kualifikasi perbuatan yang mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang atas penikmatan haknya. Namun pelanggaran ini tidak termasuk dalam perbuatan diskriminasi, karena pada pemberitaan pelanggaran hak ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak dan latar belakang perlakuannya. Sedangkan pada pemberitaan diskriminasi tercantum jelas bahwa dasar perlakuannya adalah status HIV.

Pada tabel di atas, terdapat tujuh bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak. Berikut akan dibahas mendetil berdasarkan kesamaan hak yang dilanggar.

1. Hak atas Kesehatan

Dari tujuh bentuk pelanggaran di atas yang dikidak ategorikan dalam pelanggaran hak atas kesehatan adalah pemeriksaan HIV tanpa izin serta permasalahan akses dan ketersediaan layanan kesehatan. Dari lima jenis tersebut, pemeriksaan HIV tanpa izin menempati jumlah tertinggi dalam pemberitaan, yaitu 30 kasus. Kemudian permasalahan akses terhadap layanan kesehatan menempati tertinggi kedua dengan jumlah enam berita. Serta permasalahan ketersediaan layanan kesehatan berjumlah dua berita.

Pemeriksaan HIV tanpa izin ini salah satunya terjadi pada seorang tahanan perempuan yang melahirkan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Berdalih tahanan tersebut memiliki perilaku berisiko, tes kesehatan langsung dilakukan oleh pihak Lapas. Perbuatan ini melanggar aspek kebebasan (*freedom*) dalam konsep hak atas kesehatan.⁶⁶ Pun pada Skema Konseling dan Tes HIV Sukarela yang digunakan dalam program pencegahan HIV secara jelas diatur bahwa pelaksanaan tes HIV harus dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) oleh calon pasien.⁶⁷

Selain hal tersebut, pelanggaran hak juga terjadi pada seorang ODHA yang hendak berobat di RSUD Gabriel Manek Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur.⁶⁸ Permohonan akses layanan kesehatan ODHA ini sempat ditolak karena pihak RSUD beralasan pasien tidak memiliki rujukan dari Puskesmas dan tidak memiliki BPJS. Kemudian ODHA ini kembali mengakses layanan kesehatan dan setelah membayarkan sejumlah uang untuk pengobatan, penanganan dari pihak medis tidak diterimanya.

Persoalan yang terjadi di RSUD Gabriel Manek Atambua ini tidak sebatas pada persoalan akses layanan kesehatan saja. ODHA mengeluhkan biaya yang harus

⁶⁶ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, par. 8.

⁶⁷ Indonesia, Menteri Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV*, Permenkes No. 74 Tahun 2014, Pasal 3.

⁶⁸ Poskupang.com, "Ini Kebijakan Direktur RSUD MGR Gabriel Manek terkait Pungutan terhadap pasien ODHA", <http://kupang.tribunnews.com/2018/01/10/ini-kebijakan-direktur-rsud-mgr-gabriel-manek-terkait-pungutan-terhadap-pasien-ODHA>, diakses 1 April 2019.

dibayarkan pada pihak rumah sakit.⁶⁹ Uang sejumlah Rp. 35.000 dirasa berat oleh ODHA ditambah lagi kondisinya yang mudah lelah dan sering sakit sangat tidak memungkinkan untuk bekerja yang menghasilkan banyak pemasukan. Pun tempat tinggal ODHA yang jauh dari rumah sakit menjadi persoalan yang tidak bisa diremehkan dalam memudahkan aksesnya untuk mendapat layanan kesehatan.

Pada kasus-kasus ini, pelanggaran hak atas kesehatan tidak hanya cedera dalam pemenuhan aspek dasar kebebasan (*freedom*) atau keberhakan (*entitlement*). Di antara empat elemen indikator pemenuhan hak atas kesehatan⁷⁰ berupa ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*), komponen keterjangkauanlah yang tidak diberikan pada ODHA tersebut.

Elemen keterjangkauan ini memuat empat hal yang menjadi dasar patokan dalam memberi layanan kesehatan, yakni nondiskriminasi, keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi (*affordable*), dan keterjangkauan informasi. Sebagai kelompok rentan ODHA tidak semestinya mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka berhak mendapat layanan kesehatan yang sama dengan pasien lain tanpa memandang status sosial dan latar belakangnya. Apalagi dalam kasus ini ODHA sudah membayarkan sejumlah uang.

Lokasi rumah sakit juga menjadi pertimbangan dalam keterjangkauan layanan kesehatan, berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh yang diperlukan, begitupun dengan biaya transportasi yang digunakan. Pun dari keluhan biaya yang disampaikan ODHA ini tercermin bahwa layanan kesehatan tidak terjangkau secara ekonomi. Semestinya rumah sakit sebagai perwakilan negara dalam menjalankan fungsi penyelenggara kesehatan, baik sektor pemerintahan

⁶⁹ Poskupang.com, "Pasien ODHA Keluhkan Pelayanan di RSUD Gabriel Manek Atambua", <http://kupang.tribunnews.com/2018/01/09/pasien-ODHA-keluhkan-pelayanan-di-rsud-gabriel-manek-atambua?page=all>, diakses 1 April 2019.

⁷⁰ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*, Op.Cit., par. 12; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights & World Health Organization, *The Right to Health: Fact Sheet No. 31*, hal.4.

ataupun swasta, perlu memastikan agar layanan kesehatan yang diberikan telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi setiap lapisan masyarakat.⁷¹

Pihak RSUD menyadari masalah keterjangkauan tersebut harus segera diselesaikan, untuk itu pihak RSUD akan melakukan perbaikan administrasi agar pasien HIV tidak lagi mengalami kesulitan dan dapat menikmati layanan kesehatan secara cuma-cuma. Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh pimpinan RSUD tersebut dalam rangka membangun lingkungan yang mendukung bagi ODHA agar lebih baik.

2. Hak atas Privasi

Salah satu bentuk pemberitaan yang termasuk dalam kategori ini ialah pembocoran status HIV tanpa izin.⁷² Dari empat berita yang memuat tentang pembocoran status HIV, salah satunya dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan karena dianggapnya dapat mencegah penularan HIV. Status HIV seseorang adalah urusan pribadi karena menyangkut dengan informasi kesehatan dirinya. Berkaitan dengan hal ini, status HIV tidak boleh dibuka oleh siapapun dengan alasan apapun tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Pun realitas masyarakat yang masih sulit menerima ODHA membuat ODHA enggan untuk membuka statusnya karena takut menghadapi risiko-risiko lebih besar yang mungkin dihadapi, misalnya dipecat dari tempat kerja. Pelanggaran hak atas privasi ini dapat pula berujung pada diskriminasi jika menyebabkan berkurangnya hak korban untuk menikmati hak yang seharusnya. Sementara argumentasi agar orang lain tidak tertular adalah hal lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan, tetapi tidak dengan cara membuka status HIV seseorang tanpa izin. Pemerintah seharusnya membuat kondisi yang menyokong segala

⁷¹ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*, Op.Cit., par. 12 huruf b.

⁷² United Nations, Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*, 8 April 1988, diakses di <http://www.refworld.org/docid/453883f922.html>, par.17.

kebutuhan ODHA agar mereka lebih nyaman membuka dirinya dan dapat diterima di masyarakat.

3. Gabungan

Pada bagian ini akan membahas tindakan razia yang menyebabkan terlanggarnya beberapa hak sekaligus. Razia-razia yang dilakukan ini biasanya berpedoman pada peraturan daerah (Perda), seperti yang terjadi di Kota Denpasar, Bali. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melakukan razia dengan alasan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.⁷³ Pada banyak kasus Perda ketertiban umum ini selalu digunakan untuk menyelaraskan standar moral dan akhlak yang berujung perlakuan kekerasan dari aparat penegaknya.

Berdasarkan Perda ketertiban umum pulalah razia lokalisasi kerap dilakukan.⁷⁴ Berdalih ingin mencegah penularan HIV, pekerja seks ditertibkan. Bahkan, tidak jarang masyarakat yang kebetulan berada di sekitar tempat tersebut juga ditertibkan. Dampak yang ditimbulkan dari razia ini tidak bisa diabaikan, yakni terlanggarnya hak atas pekerjaan. Jika melihat pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2003 yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat, maka pekerja seks termasuk dalam kategori ini. Meski dapat digolongkan dalam pengertian tersebut, hukum formal Indonesia belum mengakui kerja seks adalah pekerjaan.

Kerangka HAM yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan tidak lantas untuk dilanggar. Apalagi ini berkaitan dengan sumber pendapatan dan kelangsungan hidup para pekerja seks. Selain menghilangkan pendapatan ekonomi pekerja seks, skema tindakan razia yang berujung pada penempatan pekerja seks di panti sosial dengan alasan melakukan pembinaan juga

⁷³ JPNN.com, "20 PSK Sanur Terjaring Razia, Ini Penampakkannya", <https://www.jpnn.com/news/20-psk-sanur-terjaring-razia-ini-penampakkannya>, diakses 20 Mei 2019.

⁷⁴ Petisi.co, "Razia Pelacuran di Tretes 11 PSK Diamankan, 1 Terjangkit HIV", <http://petisi.co/razia-pelacuran-di-tretes-11-psk-diamankan-1-terjangkit-hiv-aids/>, diakses 2 April 2019.

menimbulkan masalah tersendiri.⁷⁵ Kelangsungan hidup keluarga pekerja seks selama pekerja seks mendapat pembinaan juga harus menjadi perhatian. Sebab banyak kasus pekerja seks adalah tulang punggung keluarga.

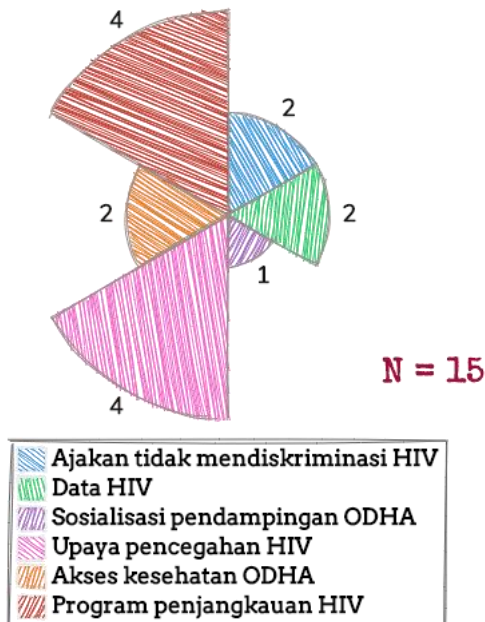
Selain di lokalisasi, razia juga dilakukan di apartemen dan panti pijat. Dari tindakan ini ditemukan beberapa perempuan yang diduga pekerja seks dan diwajibkan untuk melakukan tes HIV.⁷⁶ Razia di tempat privat yang disertai dengan pemaksaan tes HIV jelas telah mengagresi hak atas privasi dan hak atas kesehatan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mewajibkan tes HIV dengan alasan apapun melanggar aspek kebebasan dalam hak atas kesehatan dan prinsip sukarela dalam program pencegahan HIV. Apabila tindakan ini terus dibiarkan akan menghambat keberlangsungan program pencegahan HIV karena pada akhirnya dapat berujung pada diskriminasi bagi ODHA. Pun seperti dijelaskan sebelumnya, perlakuan diskriminasi berpotensi meningkatkan penyebaran HIV.

⁷⁵ Suryamalang.com, "Razia Satpol PP di Pasuruan Bocor, Kelakuan 8 PSK Bikin Salah Fokus dan Ngakak", <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/10/razia-satpol-pp-di-pasuruan-bocor-kelakuan-8-psk-bikin-salah-fokus-dan-ngakak>, diakses 2 April 2019.

⁷⁶ Tribunpekanbaru.com, "Dari 15 PSK yang Dijaring Satpol PP, 2 Orang Terkena Penyakit Kelamin, 6 Positif Narkoba", <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/08/12/dari-15-psk-yang-dijaring-satpol-pp-2-orang-terkena-penyakit-kelamin-6-positif-narkoba?page=all>, diakses 2 April 2019.

E. Bentuk Lain-Lain

Gambar 3.5. Bentuk Tindakan Lain-Lain



Seperti terlihat pada bagan di atas, kategori ini merupakan kumpulan berita yang bersifat positif dan netral. Hal ini merupakan capaian yang baik dalam program HIV, sebab beberapa media mulai memberitakan HIV dengan lebih seimbang. Sebagai contoh, media Pikiran Rakyat yang memuat berita kegiatan makan malam bersama untuk mengampanyekan Indonesia Tanpa Stigma terhadap ODHA.⁷⁷ Acara tersebut merupakan cara untuk membangun lingkungan yang mendukung kondisi ODHA, sehingga dapat menghindarkan mereka tidak hanya dari stigma, bahkan juga diskriminasi dan pelanggaran HAM. Kemudian Rancah Post yang meliput upaya RSUD Ciamis dalam mengurangi diskriminasi, berupa perbaikan kualitas layanan dengan membantu

⁷⁷ Pikiran Rakyat, "Jamuan Makan Malam Indonesia Tanpa Stigma Intim dengan ODHA", <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/04/29/jamuan-makan-malam-indonesia-tanpa-stigma-intim-dengan-ODHA-423607>, diakses 5 April 2019.

persalinan seorang perempuan HIV.⁷⁸ Mengingat bahwa persoalan utama HIV adalah kesehatan, maka dengan memberikan akses bagi ODHA untuk menjangkau layanan kesehatan sudah seharusnya dilakukan.

Sementara beberapa berita yang bersifat netral di antaranya adalah pendataan pasien HIV, program pencegahan, dan penjangkauan HIV. Pada reportase yang dilakukan Palopos, pendataan pasien ini bertujuan untuk menentukan intervensi program HIV sehingga dapat melakukan perawatan terhadap ODHA yang berada di wilayah tersebut.⁷⁹ Pun demikian dengan program pencegahan dan penjangkauan HIV yang dilakukan di Nabire, Papua, seperti yang tertuang dalam laporan Tabloid Jubi, bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan dasar tersedia dan untuk mengidentifikasi kasus-kasus penularan HIV dan TB sedini mungkin.⁸⁰

Model berita netral dan positif seputar HIV penting untuk terus dimunculkan agar wacana mengenai HIV/AIDS yang beredar di masyarakat tidak hanya yang bersifat negatif. Sehingga harapannya dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap isu HIV maupun ODHA. Untuk itu, penulis memberikan apresiasi bagi media-media yang dengan penuh kesadaran memberitakan isu HIV dengan lebih berimbang sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka stigma dan diskriminasi.

⁷⁸ Rancah Post, "Sempat Dituding Diskriminatif terhadap pasien ODHA, RSUD Ciamis Kini...", <https://www.rancahpost.com/201803104004/sempat-dituding-diskriminatif-terhadap-pasien-ODHA-rsud-ciamis-kini/>, diakses 5 April 2019.

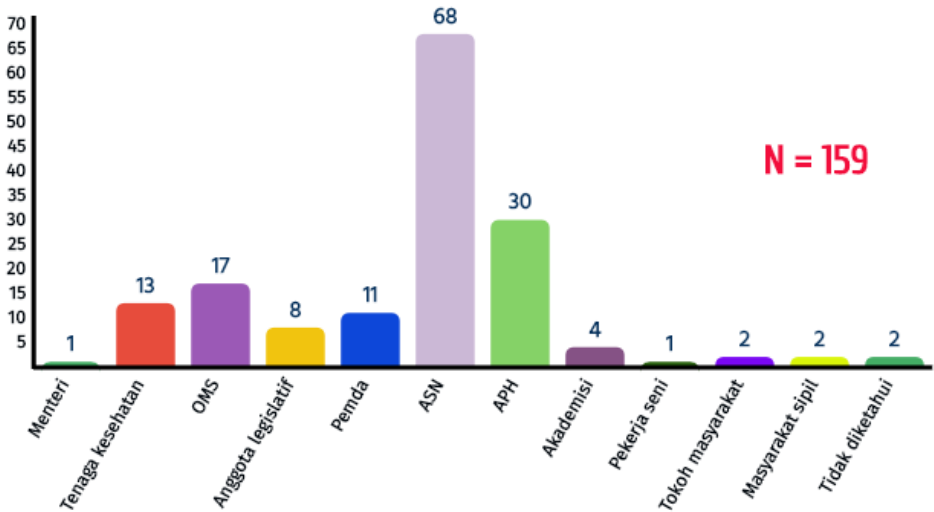
⁷⁹ Palopopos.fajar.co.id, "Warga Torut Terjangkit HIV/AIDS", <http://palopopos.fajar.co.id/2018/02/26/62-warga-torut-terjangkit-hiv-aids/>, diakses 15 April 2019.

⁸⁰ Tabloidjubi.com, "Nabire Wajibkan Pasien Memeriksa TB dan HIV", <http://tabloidjubi.com/artikel-14753--nabire-wajibkan-pasien-memeriksakan-tb-dan-hiv.html>, diakses 15 April 2019.

F. Pihak yang Diberitakan

1. Pelaku

Gambar 3.6. Pelaku Stigma, Diskriminasi dan Pelanggaran Hak



Gambaran pelaku pada bagian ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni pemerintah dan masyarakat. Menteri, tenaga kesehatan, anggota legislatif, pemerintah daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum termasuk dalam kategori pemerintah. Sedangkan organisasi nonpemerintah, akademisi, pekerja seni, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil tergolong dalam pelaku non pemerintah atau masyarakat. Serta ada dua pemberitaan yang pelakunya tidak disebutkan sehingga tidak teridentifikasi dengan baik.

Pelaku di kelompok pemerintah yang memiliki jabatan tertinggi adalah menteri. Hal ini merujuk pada Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek yang mewajibkan tes HIV bagi ibu hamil.⁸¹ Aparatur sipil negara juga menjadi penyumbang terbesar pada kelompok pelaku yang berasal dari golongan pemerintah. Semestinya dengan peran strategis yang dimiliki, aparatur sipil negara menjadi pihak yang aktif dalam upaya pemenuhan dan pemenuhan hak ODHA. Namun

⁸¹ [Republika.co.id, "Menkes Minta Ibu Hamil Wajib Tes HIV", https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/12/17/pjvv0q328-menkes-minta-ibu-hamil-wajib-tes-hiv](https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/12/17/pjvv0q328-menkes-minta-ibu-hamil-wajib-tes-hiv), diakses 21 Mei 2019.

berdasarkan data penelitian ini, terbukti bahwa sikap aparat sipil negara adalah sebaliknya.

Seringnya razia-razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga menunjukkan tingginya pelaku yang berasal dari kelompok pemerintah. Selain mengakibatkan perlakuan kekerasan, menimbulkan diskriminasi, tindakan razia ini juga seakan membenarkan stigma yang melekat pada ODHA ataupun kelompok-kelompok yang diasosiasikan lekat dengan HIV. Kejadian ini seakan mengisyaratkan kesalahpahaman HIV tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di pemerintahan.

Sedangkan dari kelompok non pemerintah, pelaku terbanyak berasal dari kalangan akademisi. Menariknya tiga di antara empat akademisi ini adalah dua orang dosen^{82,83} dan seorang dokter⁸⁴. Dengan kapasitasnya yang demikian semestinya bisa memberi pemahaman yang baik tentang isu HIV sebenarnya, berupa pencegahan ataupun cara penularan HIV. Serta yang tak kalah herannya wacana kriminalisasi kondom yang dicanangkan pemerintah dibenarkan oleh seorang direktur pusat studi HAM.⁸⁵ Bahkan dia menilai ketahanan keluarga yang dapat mencegah penyebaran HIV. Sebuah solusi yang hingga kini masih dipertanyakan implementasinya.

⁸² Gentaandalas, "PIGMAG Gelar Kuliah Umum Ketahanan Mahasiswa terhadap LGBT", <https://www.gentaandalas.com/pigmag-gelar-kuliah-umum-ketahanan-mahasiswa-terhadap-lgbt/>, diakses 21 Mei 2019.

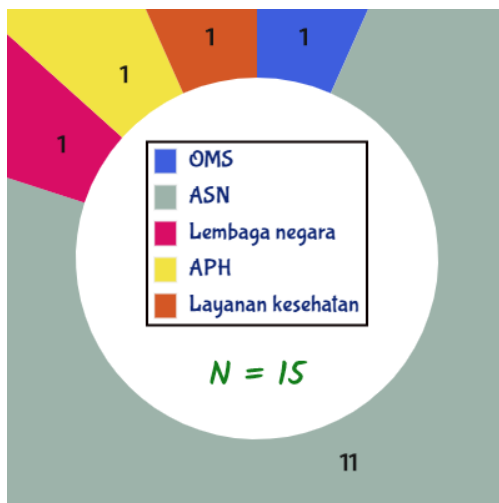
⁸³ Tribunnews.com, "Talkshow Remaja di Malang Siswa SMP Diminta Waspada LGBT", <http://jatim.tribunnews.com/2018/12/11/talkshow-kesehatan-remaja-di-malang-siswa-smp-diminta-waspada-lgbt?page=all>, diakses 21 Mei 2019.

⁸⁴ Tribunnews, "Dosen FK UII 50 Persen Penderita HIV/Aids karena Homoseksual", <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/23/dosen-fk-uii-50-persen-penderita-hivaid-karena-homoseksual>, diakses 22 Mei 2019.

⁸⁵ Republika.co.id, "Maneger: Orang yang Kampanyekan Kondom Perlu Dipidana", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/17/p49gbi384-maneger-orang-yang-kampanyekan-kondom-perlu-dipidana>, diakses 21 Mei 2019.

2. Pihak Lain-Lain

Gambar 3.7. Pihak Lain-Lain yang Diberitakan

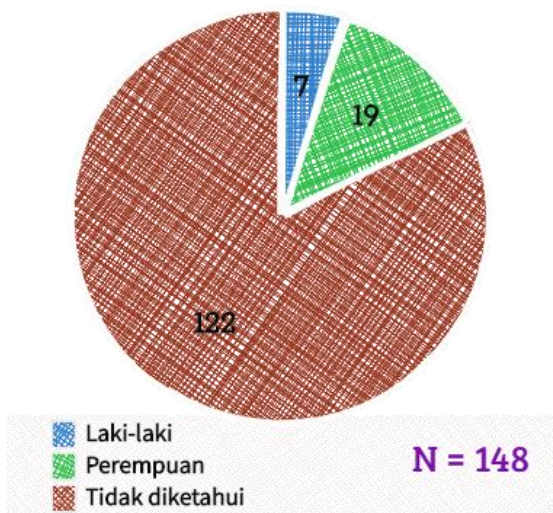


Berdasar gambar tersebut di atas pihak yang sering memberi tindakan atau pernyataan bermuatan positif dan netral juga berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Posisi aparatur sipil negara yang memiliki peran strategis memungkinkan untuk melakukan penghapusan stigma dan diskriminasi ataupun sebaliknya. Beberapa dari 11 pernyataan positif dan netral ini berasal dari pegawai dinas kesehatan dan KPA daerah. Sebagai contoh, seperti yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, perubahan pelayanan yang dilakukan RSUD Ciamis. Selain telah memudahkan ODHA untuk mengakses layanan kesehatan, RSUD Ciamis juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan dengan menambah ruang inap, menambah dan memperbaharui alat medis, serta menambah dokter pun ahli.

Kendati angka tersebut tidak dapat serta-merta mewakili fakta di lapangan, namun temuan ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup berarti. Apabila dilakukan secara berkelanjutan dapat menciptakan wacana HIV ke arah yang lebih baik dan dapat membuat lingkungan yang mendukung program HIV. Agar tercapai tujuan tersebut dibutuhkan peran media untuk memberikan pemberitaan terkait HIV dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanis.

3. Korban

Gambar 3.8. Gender Korban



Bagan di atas menjelaskan korban yang ditemukan dalam penelitian ini. Dari data yang didapat ditemukan korban laki-laki sebanyak 4,73%, korban perempuan 12,84%, dan korban yang tidak teridentifikasi gendernya berjumlah 82,43%. Korban-korban tersebut terdiri dari kelompok kunci HIV seperti LGBT, pekerja seks, pengguna narkotika, dan warga binaan pemasyarakatan. Di samping itu terdapat pula korban yang tidak termasuk dalam kelompok kunci HIV, namun menjadi korban stigma dan diskriminasi misalnya anak jalanan, calon pengantin, warga negara asing, pengunjung tempat hiburan, dan gelandangan. Melihat dari korban-korban yang teridentifikasi ini, semua kalangan bisa menjadi korban dari stigma dan diskriminasi dalam konteks HIV.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis mengenai stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak terkait isu HIV sepanjang 2018, maka simpulan yang kami dapatkan yaitu:

1. Sebanyak 95 media telah menerbitkan 148 pemberitaan terkait stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak dalam isu HIV. Media paling banyak memberitakan ialah Republika dengan presentase 6,08%.
2. Stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak dalam isu HIV paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan presentase 18,82%
3. Dari 148 berita yang ada penulis memisahkannya berdasarkan bentuk-bentuk pelanggaran, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 170 kasus. Jenis-jenis berita yang berhasil dihimpun adalah pemberitaan yang mengandung stigma 48,24%, diskriminasi 12,35%, stigma dan diskriminasi 0,59%, pelanggaran hak 30%, serta kelompok berita lain-lain 8,82%.
4. Bentuk stigma paling banyak adalah 37,80% berupa LGBT dianggap sumber penyebaran HIV. Berbeda dengan laporan tahun-tahun sebelumnya, kami mengelompokkan secara khusus berita-berita yang memuat antitesis terhadap stigma. Yakni empat jenis antitesis stigma dengan total tujuh perlakuan.
5. Bentuk diskriminasi paling banyak adalah kewajiban tes HIV dengan presentase 42,86%. Pada analisis bentuk diskriminasi, kami pun menemukan antitesis dari berita-berita seputar diskriminasi terhadap ODHA. Yakni enam jenis antitesis diskriminasi dengan total enam perlakuan.
6. Kami menemukan bahwa pelanggaran hak memiliki jumlah berita terbanyak setelah stigma, yaitu 58,83% berupa pemeriksaan HIV tanpa izin pasien.
7. Selain itu, kami pun mendapati berita lain-lain sebanyak delapan jenis dengan total 15 perlakuan. Program penjangkauan HIV ke kelompok kunci dan upaya pencegahan penularan HIV, adalah berita terbanyak dalam kelompok bentuk lain-lain.
8. Pihak yang paling banyak menjadi pelaku stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak dalam isu HIV adalah aparatur sipil negara dengan presentase 42,77%.

9. Sementara pihak yang dikutip pernyataannya dalam kelompok berita lain-lain adalah aparat sipil negara dengan presentase 73,33%. Ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pemanusiaan ODHA.
10. Untuk perhitungan korban stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak, angka-angka tertinggi didapat dari korban yang tidak diketahui secara pasti identitas gendernya, yakni 82,43%. Kemudian korban tertinggi kedua perempuan dengan presentase 12,84%, dan laki-laki 4,73%.

B. Saran

Dari penjelasan tersebut, ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan melalui laporan ini. Stigma dan diskriminasi menjadi masalah dasar yang belum berubah dari tahun ke tahun. Angka-angka perlakuan masyarakat atas dua perlakuan tersebut pada ODHA semakin tinggi. Namun munculnya ajakan penghapusan ODHA menjadi angin segar dalam perlawanan terhadap stigma dan diskriminasi. Seyogianya pihak-pihak yang paham pada penyebaran, pencegahan, dan permasalahan ODHA lainnya juga turut terlibat dalam menyuarakan. Sehingga membangun pemahaman akan HIV pada masyarakat akan lebih mudah.

Media sebagai penyaji pemberitaan memegang peranan penting. Dari media masyarakat mendapat banyak kabar dan pengetahuan. Tentu sudah sepatutnya media memposisikan diri sebagai pemberita yang baik dan yang manusiawi, sehingga menyampaikan berita-berita yang bermuatan potensi stigma tidak dilakukan.

Porsi terbanyak dalam melawan stigma dan diskriminasi berada di tangan pemerintah. Namun angka pelaku juga banyak memuat aparat sipil negara. Sebagai pemegang kendali sudah sepatutnya untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ODHA. Memastikan dengan baik ODHA mendapat perlakuan yang setara dengan masyarakat lain. Jika program-program penanggulangan HIV yang dicanangkan pemerintah masih kerap kali berbenturan dengan aparatnya sendiri, tidak akan memanen hasil seperti yang dicita-citakan. Juga perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar sektor terkait kebijakan dan penanggulangan HIV.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi dan Dokumen Internasional

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*. E/C.12/2000/4. 11 Agustus 2000.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights & World Health Organization. *The Right to Health: Fact Sheet No. 31*. Tersedia di: https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/Factsheet31.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1.

United Nations, Human Rights Committee (HRC). *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*. 8 April 1988. Tersedia di: <http://www.refworld.org/docid/453883f922.html>.

Peraturan Nasional

Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV. Permenkes No. 74 Tahun 2014.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, Kepmen No. KEP.68/MEN/IV/2004.

Laporan

Aotari, Fuji. (2017). *Seri Monitoring dan Dokumentasi 2016: Diskriminasi HIV Stigma yang Mewabah*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Masyarakat.

Kementerian Kesehatan. (2017). Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Tersedia di:

National Institute for Health. (2018). *Nanotechnology and the Future of Condoms in the Prevention of Sexually Transmitted Infections*. Tersedia di: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5875119/>.

Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya. (2016). *Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi*. Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya.

Tersedia di: <https://arc-atmajaya.org/catatan-penelitian-dampak-penutupan-lokalisasi/>.

Teachers' Guide for the Reference Material on HIV. (2017). *AIDS & STI for High School Students*. Pihillipines. Tersedia di: http://www.fast-trackcities.org/sites/default/files/Teachers%20Guide_Final_7182017.pdf.

UNAIDS. (2005). *HIV-Related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations: Case studies of successful programmes*. USA: UNAIDS. Tersedia di: http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol_en.pdf.

UNICEF, Innocenti Research Centre. (2006). *Caring for Children Affected by HIV and AIDS*. Italy: UNICEF. Tersedia di: <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight-hiv-eng.pdf>.

[http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan HIV AIDS TW 1 2017 rev.pdf](http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2017_rev.pdf).

[http://www.siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan HIV AIDS TW 2 2017.pdf](http://www.siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_2_2017.pdf).

[http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan HIV AIDS TW 3 2017.pdf](http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_3_2017.pdf).

[http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan HIV AIDS TW 4 Tahun 2017 1 .pdf](http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_4_Tahun_2017_1.pdf).

Situs Web

"168 Penderita HIV/AIDS Baru di Cianjur, 86 Di antaranya Gay". Netralnews. 30 Januari 2018.

<http://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/125915/168.penderitaa.hiv.aids.baru.di.cianjur>. Diakses 11 April 2019.

"20 PSK Sanur Terjaring Razia, Ini Penampakannya". JPNN.com. 29 November 2018. <https://www.jpnn.com/news/20-psk-sanur-terjaring-razia-ini-penampakannya>. Diakses 20 Mei 2019.

"2019 Kaltara Bebas Lokalisasi, Tarakan dan Nunukan jadi Target". Prokal.co. 17 Mei 2018. <http://bulungan.prokal.co/read/news/12828-2019-kaltara-bebas-lokalisasi-tarakan-dan-nunukan-jadi-target.html>. Diakses 14 Maret 2019.

- "28 Persen dari 89 Juta Anak Indonesia Terinfeksi HIV". Dnaberita.com. 15 Januari 2018. <http://dnaberita.com/2018/01/15/28-persen-dari-89-juta-anak-indonesia-tarinfeksi-hiv-aids/>. Diakses 29 April 2019.
- "4 Prinsip Penularan HIV". Kompas.com. 1 Desember 2018. <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/12/01/11380924/4.prinsip.penularan.hiv>. Diakses 19 Mei 2019.
- "50 Modin Dapat Pelatihan Rawat Jenazah ODHA". Jateng.tribunnews.com. 27 Maret 2018. <http://jateng.tribunnews.com/2018/03/27/50-modin-dapat-pelatihan-rawat-jenazah-odha>. Diakses 17 April 2019.
- "62 Warga Torut Terjangkit HIV/AIDS". Palopopos.co.id. 26 Februari 2018. <http://palopopos.fajar.co.id/2018/02/26/62-warga-torut-terjangkit-hiv-aids/>. Diakses 15 April 2019.
- "Berdalih untuk Mencegah HIV/AIDS Pemda Sumbar Ingin 'Memberantas' LGBT". BBC.com. 11 Januari 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42612086>. Diakses 19 Mei 2019.
- "Berhasil Finis Marathon 42 Km, Tesa Patahkan Stigma HIV-AIDS". Health.detik.com. 4 Desember 2018. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4329534/berhasil-finis-marathon-42-km-tesa-patahkan-stigma-hiv-aids>. Diakses pada 20 Mei 2019.
- "Calon Atlet PON Papua Positif HIV". Pasificpos.com. 2 Mei 2018. <https://www.pasificpos.com/item/25312-calon-atlet-pon-papua-positif-hiv>. Diakses 14 Maret 2019.
- "Calon Pengantin Binjai Ikuti Tes Narkoba Ini Hasilnya". Jurnas.com. 13 Februari 2018. <http://www.jurnas.com/artikel/29118/539-Calon-Pengantin-Binjai-Ikuti-Tes-Narkoba-Ini-Hasilnya/>. Diakses 19 Mei 2019.
- "Calon Pengantin di Tangsel Wajib Tes HIV/AIDS". Bisnisjakarta.co. <https://bisnisjakarta.co.id/2018/01/22/calon-pengantin-di-tangsel-wajib-tes-hiv-aids/>. Diakses 19 Mei 2019.
- "Care and Treatment Children Living HIV". Thewellproject.org. 9 Januari 2019. <https://www.thewellproject.org/hiv-information/care-and-treatment-children-living-hiv>. Diakses 19 Mei 2019.
- "Cegah Penularan HIV/Aids Pemkab Tangerang Libatkan Tokoh Agama". Bantenhits.com. 28 Agustus 2018. <https://bantenhits.com/2018/08/28/cegah-penularan-hiv-aids-pemkab-tangerang-libatkan-tokoh-agama/>. Diakses 19 Maret 2019.
- "Dari 15 PSK yang Dijaring Satpol PP, 2 Orang Terkena Penyakit Kelamin, 6 Positif Narkoba". Tribunpekanbaru.com. 12 Agustus 2018. <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/08/12/dari-15-psk-yang->

[dijaring-satpol-pp-2-orang-terkena-penyakit-kelamin-6-positif-narkoba?page=all](#). Diakses 2 April 2019.

"Dehidrasi, Satu Napi Teroris di Nusakambangan Meninggal Dunia". Kontan.co.id. 22 September 2018.

<https://regional.kontan.co.id/news/dehidrasi-satu-napi-teroris-di-nusakambangan-meninggal-dunia>. Diakses Maret 2019.

"DKK Kota Salatiga Perlu Partisipasi Masyarakat untuk Mengurangi Penderita HIV/AIDS". Jateng.tribunnews.com. 4 Desember 2018.

<http://jateng.tribunnews.com/2018/12/04/dkk-kota-salatiga-perlu-partisipasi-masyarakat-untuk-mengurangi-penderita-hivaid>s. Diakses 22 Maret 2019.

"Dosen FK UII 50 Persen Penderita HIV/Aids karena Homoseksual". Tribunnews. 23 Januari 2018.

<http://jogja.tribunnews.com/2018/01/23/dosen-fk-uii-50-persen-penderita-hivaid>s-karena-homoseksual. Diakses 22 Mei 2019.

"Duh Jumlah ODHA di Bitung Masih Tinggi dan Terus Meningkat". Manado.tribunnews.com. 22 Februari 2018.

<http://manado.tribunnews.com/2018/02/22/duh-jumlah-odha-di-bitung-masih-tinggi-dan-terus-meningkat>. Diakses 11 April 2019.

"Empat Prinsip Penularan HIV yang Harus Dipahami". Jurnas.com.

<http://www.jurnas.com/artikel/34528/Empat-Prinsip-Penularan-HIV-yang-Harus-Dipahami/>. Diakses 8 April 2019.

"Hingga Januari 2018 Tercatat 2 Warga Lampura Positif HIV". Lampung.tribunnews.com. 20 Februari 2018.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/02/20/hingga-januari-2018-tercatat-2-warga-lampura-positif-hiv>. Diakses 11 April 2019.

"HIV dan Alat Suntik Narkoba". Rumah Cemara. 27 Juli 2016.

<https://rumahcemara.or.id/hiv-dan-alat-suntik-narkoba/>. Diakses 16 Mei 2019.

"Ini Kebijakan Direktur RSUD MGR Gabriel Manek terkait Pungutan terhadap pasien ODHA". Poskupang.com.

<http://kupang.tribunnews.com/2018/01/10/ini-kebijakan-direktur-rsud-mgr-gabriel-manek-terkait-pungutan-terhadap-pasien-ODHA>. Diakses 1 April 2019.

"Ini Pertama Kalinya Imigrasi Singaraja Deportasi WNA Pengidap HIV/AIDS". Kaltim.tribunnews.com. 6 November 2018.

<http://kaltim.tribunnews.com/2018/11/06/ini-pertama-kalinya-imigrasi->

- [singaraja-deportasi-wna-pengidap-hiv-aids?page=all](#). Diakses 22 Maret 2019.
- "Jamuan Makan Malam Indonesia Tanpa Stigma Intim dengan ODHA". Pikiran Rakyat. 29 April 2018. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/04/29/jamuan-makan-malam-indonesia-tanpa-stigma-intim-dengan-ODHA-423607>. Diakses 5 April 2019.
- "Jenazah Penderita HIV/AIDS Aman untuk Dimandikan". Sukoharjone.com. 11 Januari 2018. <https://sukoharjone.com/ragam/jenazah-penderita-hiv-aids-aman-untuk-dimandikan/>. Diakses 14 Maret 2019.
- "Kasus HIV/AIDS di Sukabumi Capai 659 Orang". Republika. 21 Maret 2018. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/20/p5w4bv384-kasus-hiv-aids-di-sukabumi-capai-659-orang>. Diakses 13 Mei 2019.
- "Kasus HIV/AIDS Meningkat Warga Purbalingga Diminta Sukarela Periksa ke Dokter". Merdeka.com. 17 Januari 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-hiv-aids-meningkat-warga-purbalingga-diminta-sukarela-periksa-ke-dokter.html>. Diakses 17 April 2019.
- "Kesadaran Pekerja Seks tentang Risiko HIV/AIDS". VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kesadaran-pekerja-seks-tentang-risiko-hiv-aids/4148131.html>. Diakses 14 Mei 2019.
- "Kisah Bocah SD yang Dikucilkan di Sekolahnya Karena Ketahuan HIV". Tribunnews.com. 23 September 2018. <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/23/kisah-bocah-sd-yang-dikucilkan-di-sekolahnya-karena-ketahuan-tertular-hiv?page=all>. Diakses 1 April 2019.
- "KPA Klaten Temukan Seorang Pengidap HIV Asal Luar Kota". Suaramerdeka.com. 9 Mei 2018. <https://www.suaramerdeka.com/kesehatan/baca/83841/kpa-klaten-temukan-seorang-pengidap-hiv-asal-luar-kota>. Diakses 8 April 2019.
- "LGBT Faktor Penyebab Dampak dan Cara Mengatasinya". Rakyat Merdeka. 6 Februari 2018. <https://rmol.co/amp/2018/02/06/325739/LGBT,-Faktor-Penyebab,-Dampak-Dan-Cara-Mengatasinya->. Diakses 10 Mei 2019.
- "Lokalisasi di Klungkung Terpusat di Wilayah Ini PSK di Bedeng hingga Penginapan Short Time". Bali.tribunnews.com. 19 April 2018. <http://bali.tribunnews.com/2018/04/19/5-lokalisasi-di-klungkung-terpusat-di-wilayah-ini-psk-di-bedeng-hingga-penginapan-short-time?page=2>. Diakses 29 April 2019.

- "Manege: Orang yang Kampanyekan Kondom Perlu Dipidana". [Republika.co.id](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/17/p49gbi384-maneger-orang-yang-kampanyekan-kondom-perlu-dipidana). 17 Februari 2018.
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/17/p49gbi384-maneger-orang-yang-kampanyekan-kondom-perlu-dipidana>.
Diakses 16 April 2019.
- "Menkes Minta Ibu Hamil Wajib Tes HIV". [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/12/17/pjvv0q328-menkes-minta-ibu-hamil-wajib-tes-hiv). 17 Desember 2018.
<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/12/17/pjvv0q328-menkes-minta-ibu-hamil-wajib-tes-hiv>.
Diakses 21 Mei 2019.
- "Miris 80 Bayi Lahir di RSUD dr Soetomo Terinfeksi HIV". [Tagar.id](https://www.tagar.id/miris-80-bayi-lahir-di-rsud-dr-soetomoterinfeksi-hiv). 23 Maret 2018.
<https://www.tagar.id/miris-80-bayi-lahir-di-rsud-dr-soetomoterinfeksi-hiv>.
Diakses 18 April 2019.
- "Morfin". [Alodokter](https://www.alodokter.com/morfin). <https://www.alodokter.com/morfin>. Diakses 15 Mei 2019.
"Sebelum Menikah Calon Pengantin Wajib Tes HIV". [Fajar.co.id](https://fajar.co.id/2018/01/19/sebelum-menikah-calon-pengantin-wajib-tes-hiv/). 19 Januari 2018.
<https://fajar.co.id/2018/01/19/sebelum-menikah-calon-pengantin-wajib-tes-hiv/>.
Diakses 14 Maret 2019.
- "MUI Serukan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Tondo Kiri". [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/18/04/18/mui-serukan-penutupan-lokalisasi-prostitusi-tondo-kiri). 12 April 2018.
- "Nabire Wajibkan Pasien Memeriksa TB dan HIV". [Tabloidjubi.com](http://tabloidjubi.com/artikel-14753--nabire-wajibkan-pasien-memeriksantb-dan-hiv.html). 20 Maret 2018.
<http://tabloidjubi.com/artikel-14753--nabire-wajibkan-pasien-memeriksantb-dan-hiv.html>.
Diakses 15 April 2019.
- "Orang Terjangkit HIV/Aids Rata-Rata Diderita Kaum LGBT". [Okezone.com](https://lifestyle.okezone.com/read/2018/01/22/481/1848615/waduh-2-487-orang-terjangkit-hiv-aids-rata-rata-diderita-kaum-lgbt). 22 Januari 2018.
<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/01/22/481/1848615/waduh-2-487-orang-terjangkit-hiv-aids-rata-rata-diderita-kaum-lgbt>.
Diakses 19 Maret 2019.
- "Pakai Modus Baru Belasan PSK Diamankan". [Manado.tribunnews.com](http://manado.tribunnews.com/2018/02/01/pakai-modus-baru-belasan-pskdiamankan-satpol-pp). 1 Februari 2018.
<http://manado.tribunnews.com/2018/02/01/pakai-modus-baru-belasan-pskdiamankan-satpol-pp>.
Diakses 8 April 2019.
- "Pasangan Sekamar Bukan Muhrim Terjaring Razia Satpol PP Kota Sukabumi". [Jabar.pojoksatu.id](http://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2018/05/15/pasangan-sekamar-bukan-muhrim-terjaring-razia-satpol-pp-kota-sukabumi/). 15 Mei 2018.
<http://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2018/05/15/pasangan-sekamar-bukan-muhrim-terjaring-razia-satpol-pp-kota-sukabumi/>.
Diakses 8 April 2019.
- "Pasien ODHA Keluhkan Pelayanan di RSUD Gabriel Manek Atambua". [Poskupang.com](http://kupang.tribunnews.com/2018/01/09/pasien-odha-keluhkan-pelayanan-di-rsud-gabriel-manek-atambua).
<http://kupang.tribunnews.com/2018/01/09/pasien-odha-keluhkan-pelayanan-di-rsud-gabriel-manek-atambua>.

[ODHA-keluhkan-pelayanan-di-rsud-gabriel-manek-atambua?page=all](http://www.odha-luh.com/odha-keluhkan-pelayanan-di-rsud-gabriel-manek-atambua?page=all).

Diakses 1 April 2019.

"Peran Masyarakat Nonkesehatan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS". Kebijakan AIDS Indonesia. 30 November 2015.

<http://www.kebijakaanidsindonesia.net/id/artikel/artikel-tematik/1316-peran-masyarakat-non-kesehatan-dalam-penanggulangan-hiv-dan-aids>. Diakses 16 April 2019.

"PIKMAG Gelar Kuliah Umum Ketahanan Mahasiswa Terhadap LGBT". Gentaandalas.com. 30 Agustus 2018.

<https://www.gentaandalas.com/pigmag-gelar-kuliah-umum-ketahanan-mahasiswa-terhadap-lgbt/>. Diakses 29 April 2019.

"Politikus Demokrat Usul ATM Kondom". JPNN.com. 12 Februari 2018.

<https://www.jpnn.com/news/politikus-demokrat-usul-atm-kondom>. Diakses 18 April 2019.

"PSK di Probolinggo Postif HIV/AIDS". Wartabromo.com. 28 November 2018.

<https://www.wartabromo.com/2018/11/28/3-psk-di-probolinggo-positif-hiv-aids/>. Diakses 22 Maret 2019.

"Razia Pelacuran di Tretes 11 PSK Diamankan, 1 Terjangkit HIV". Petisi.co. 15 Maret 2018.

<http://petisi.co/razia-pelacuran-di-tretes-11-psk-diamankan-1-terjangkit-hiv-aids/>. Diakses 2 April 2019.

"Razia Satpol PP di Pasuruan Bocor, Kelakuan 8 PSK Bikin Salah Fokus dan Ngakak". Suryamalang.com. 10 Juli 2018.

<http://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/10/razia-satpol-pp-di-pasuruan-bocor-kelakuan-8-psk-bikin-salah-fokus-dan-ngakak>. Diakses 2 April 2019.

"Sebanyak 6 Bayi di Purbalingga Berpotensi Tertular HIV/AIDS". Jateng.tribunnews.com. 27 Januari 2018.

<http://jateng.tribunnews.com/2018/01/27/sebanyak-6-bayi-di-purbalingga-berpotensi-tertular-hiv-aids>. Diakses 19 Mei 2019.

"Sebelum Menikah Calon Pengantin Wajib Tes HIV". Fajar.co.id. 19 Januari 2018.

<https://fajar.co.id/2018/01/19/sebelum-menikah-calon-pengantin-wajib-tes-hiv/>, diakses 19 Mei 2019.

"Sekolah Dinas Kementerian Hukum dan HAM Buka Pendaftaran". Detik.com. 8 April 2018.

<https://finance.detik.com/lowongan-kerja/d-3960318/sekolah-dinas-kementerian-hukum-dan-ham-buka-pendaftaran>. Diakses 11 April 2019.

"Sempat Dituding Diskriminatif terhadap Pasien ODHA, RSUD Ciamis Kini...". Rancahpost. 11 Maret 2018.

- <https://www.rancahpost.com/201803104004/sempat-dituding-diskriminatif-terhadap-pasien-odha-rsud-ciamis-kini/>. Diakses 14 Maret 2019.
- "Status ODHA Tak Halangi Eva Berprestasi di Olahraga". Medcom.id. 2 Oktober 2018. <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/RkjZEW3k-status-odha-tak-halangi-eva-berprestasi-di-olahraga>. Diakses pada 20 Mei 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/12/p416tg377>. Diakses 8 April 2019.
- "Stigma and discrimination". World Health Organization Regional Office for Europe. <http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-areas/stigma-and-discrimination>. Diakses 1 April 2019.
- "Tahun Ini Kabupaten Malang Ditarget Jadi Wilayah Industri Terbaik di Jawa Timur". Malangtimes.com. 20 Januari 2018. <http://www.malangtimes.com/baca/24229/20180120/123737/tahun-ini-kabupaten-malang-ditarget-jadi-wilayah-industri-terbaik-di-jawa-timur/>. Diakses 11 April 2019.
- "Talkshow Remaja di Malang Siswa SMP Diminta Waspada LGBT". Tribunnews.com. 11 Desember 2018. <http://jatim.tribunnews.com/2018/12/11/talkshow-kesehatan-remaja-di-malang-siswa-smp-diminta-waspada-lgbt?page=all>. Diakses 21 Mei 2019.
- "Tepis Stigma Negatif terhadap Penderita HIV/AIDS". Wartabromo. 6 Desember 2018. <https://www.wartabromo.com/2018/12/06/tepis-stigma-negatif-terhadap-penderita-hiv-aids/>. Diakses 13 Mei 2019.
- "Tiga Anak Pengidap HIV Terancam Diusir dari Samosir". Cnnindonesia.com. 22 Oktober 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181022072221-20-340275/tiga-anak-pengidap-hiv-terancam-diusir-dari-samosir>. Diakses 23 April 2019.
- "Waduh Celaka Penderita HIV/AIDS Meningkat". Kaltara.prokal.co. 31 Agustus 2018. <http://kaltara.prokal.co/read/news/21554-waduh-celaka-penderita-hiv-aids-meningkat.html>. Diakses 17 April 2019.
- "Walah 13 Bayi di Majalengka Tertular HIV/AIDS". Radarcirebon.com. 27 Januari 2018. <http://www.radarcirebon.com/walah-13-bayi-di-majalengka-tertular-hiv-aids.html>. Diakses 19 Maret 2019.

